

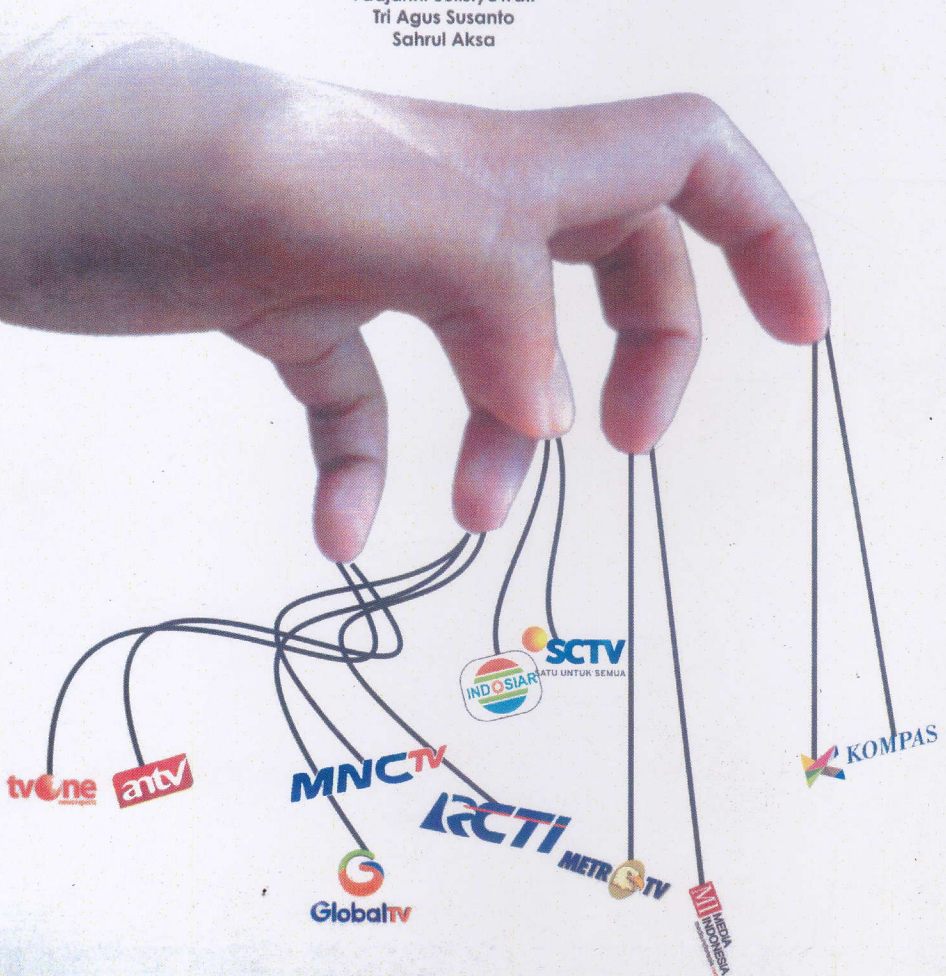


Prodi Ilmu Komunikasi
STPM "APMD"



KOMUNIKASI DAN REALITAS MEDIA DI INDONESIA

Fadjarini Sulistyowati
Tri Agus Susanto
Sahrul Aksa



INSTALASI KOMUNIKASI DALAM HUMANISME: UPAYA MELACAK EPISTEMOLOGI

Sahrul Aksa¹

*Terburai di kota-kota berjauhan
sendiri dan berlaksa kita bermain sebagai Adam (atau Hawa)
memberi nama segala.*

*Di lereng panjang malam hari, di tapal batas dini hari
kita mencari (masih kuingat) kata-kata untuk bulan, untuk mant,
untuk pagi.*

(Jorge Luis Borges)

Komunikasi adalah tindakan pertama di awal kehidupan manusia. Komunikasi muncul ketika manusia hendak menyampaikan keterbatasannya sebagai makhluk berhadapan dengan realitas alam maha luas yang melingkupi dirinya. Naluri manusia yang tidak terbatas (jauh melebihi inderanya), kemudian hakekat manusia yang memiliki kehendak untuk mengetahui segala sesuatu memunculkan kontradiksi pada diri manusia sebagai dualisme tubuh dan jiwa. Karena naluri menguasai dan mengetahui segala sesuatu di satu sisi, berhadapan dengan keterbatasan raga di sisi lain, mendorong manusia untuk melakukan representasi yang sebelumnya hanya berupa

1 Sahrul Aksa adalah dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi STPMMD “APMD” Yogyakarta, juga sebagai koordinator Laboratorium Sosial dan Komunikasi.

imajinasi. Representasi merupakan produk kebudayaan manusia yang diaktualisasikan untuk menghidupkan kebudayaan itu sendiri, untuk membangun peradaban. Max Horkheimer mengistilahkan sebagai proses substitusi (pengganti/perwakilan) terhadap suatu wujud atau peristiwa melalui bentuk-bentuk yang diidealkan dalam kehidupan sehari-hari (Sindhunata, 1983: 128). Bersamaan dengan itu pula, bahasa sebagai alat vital komunikasi menjadi kendaraan terhadap ekspresi keterbatasan yang mereproduksi kegelisahan tersebut ke dalam bentuk tindakan bertutur.

Selanjutnya manusia menghasilkan kebudayaannya sepanjang hidup, mengelolanya menjadi peradaban yang menunjukkan karakteristik dalam konteks ruang-waktu berbeda-beda. Dalam kehidupan modern ada anggapan mengenai representasi pada tindakan bertutur sebagai ekspresi keterbatasan manusia yang menganggap bahwa proses itu muncul ketika teknologi yang kompleks belum hadir untuk membantu manusia mengatasi lingkungan. Sejatinya representasi berlangsung terus menerus. Horkheimer mengatakan bahwa proses representasi yang juga adalah usaha manusia rasional justru melahirkan mitos-mitos baru. Rasionalisasi manusia modern adalah mitologisasi itu sendiri dimana representasi selalu muncul (Sindhunata, *ibid*: 125-135). Nada yang sama dikemukakan Albert Camus dengan mengandaikan usaha manusia rasional seperti kisah Sisifus (Camus, 1999: 154-159). Camus mengilustrasikan bahwa Sisifus oleh para Dewa dihukum untuk mendorong sebuah batu besar ke puncak sebuah bukit, sesampai di puncak bukit, batu tersebut menggelinding kembali ke kaki bukit oleh beratnya sendiri, bukan oleh kelengahan Sisifus. Demikian terus, Sisifus mengulangi dan menggelinding lagi. Ilustrasi Camus menjelaskan bahwa usaha manusia rasional adalah upaya untuk memecahkan mitos-mitos baru dan selalu muncul sepanjang hidup manusia. Mitos baru muncul justru ketika manusia mencapai puncak rasionalitasnya. Bagi Camus, rasionalitas manusia tidak membunuh mitos, tetapi mereproduksi mitos untuk dialektika kebudayaan manusia.

Beberapa penggagas kebudayaan berpendapat bahwa mitos sudah lama ditinggalkan manusia sejak memasuki proses ontologis dan kejayaan ilmu pengetahuan. Van Peursen salah satunya, mengatakan bahwa proses sejarah perkembangan kebudayaan manusia mengikuti tiga alur yakni alam pemikiran mitos, ontologis dan fungsional. Selanjutnya Peursen mengatakan bahwa alam pemikiran mitos sudah lama ditinggalkan meskipun masih tetap menarik dipelajari sampai sekarang (Peursen, 1985: 34-35). Pendapat Peursen memang beraliran modernis fungsional, dalam uraiannya lebih lanjut mengabaikan sendiri pendapatnya bahwa manusia lahir telah membawa mitos sebagai bakat. Sementara ilmuwan kritik mengatakan bahwa seluruh gejala kehidupan manusia tertuang pada sepanjang sejarah kehidupannya, mitos selalu ada, tidak pernah diruntuhkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau Horkheimer mengatakan bahwa mitologisasi merupakan dilema usaha manusia rasional, maka Camus mengandaikannya seperti upaya membawa batu besar ke puncak bukit dan menggelinding lagi ke kaki bukit. Ini jelas bukan suatu kesia-siaan. Camus menggambarkan sebuah pencapaian sebagai awal pencarian baru, atau upaya memecahkan mitos yang akan melahirkan mitos baru oleh Horkheimer.

Pendapat dua aliran pemikiran di atas terhadap mitos menggambarkan bahwa mitos selalu ada di tingkatan masyarakat kapan dan di manapun. Mitos sudah ada dan menjadi bakat sejak manusia ada serta ikut mengalami perubahan pengertian menyertai perkembangan kebudayaan. Kalau dulu rasionalitas merupakan upaya penaklukan manusia terhadap kekuatan alam yang tersembunyi, maka sekarang rasionalitas adalah upaya mengembalikan kesadaran manusia atas determinasi pengetahuan dan teknologi yang membuat manusia terkungkung dalam kondisi satu dimensi.²

2 Konsep manusia satu dimensi (*one dimensional man*) dikemukakan oleh Herbert Marcuse. untuk mengamati kondisi eropa yang mulai memasuki puncak pencapaian industrialisasi. Bagi Marcuse persoalan ini adalah absurditas karena pencapaian industrialisasi tidak menyejahterakan manusia,

Kembali ke persoalan representasi sebagai ekspresi keterbatasan manusia yang menjadi bentuk komunikasi awal manusia, menimbulkan pertanyaan. Bagaimana konfigurasi terciptanya komunikasi? Tulisan ini hendak mengurai konfigurasi tersebut. Karena langkah penjelasannya dengan memperhatikan kompleksitas tubuh manusia secara holistik, maka saya menyebutnya sebagai pendekatan humanisme untuk menemukan komunikasi.

A. Representasi, Ekspresi Keterbatasan Manusia

Representasi merupakan muara sungai raksasa perdebatan dari dua anak sungai pemikiran sepanjang sejarah rasionalitas. Sungai pertama adalah prinsip idealisme Plato dan sungai kedua empirisme Aristoteles. Plato berpendapat bahwa sesungguhnya sejak lahir manusia telah membawa rekaman tentang ide alam semesta yang disebut *arketipe* (Russell, 2002: 165-167). *Arketipe* dalam simbolisasi, diibaratkan perahu Nuh yang dimuati prototipe makhluk yang dibawa berlayar dan berkembang biak setelah bencana banjir besar reda. Pada perjalanan lebih lanjut terdapat distorsi dan penyimpangan terhadap prototipe baik yang cacat maupun peristiwa fisiologis. Tapi distorsi tersebut tidak mengganggu sosok prototipe di alam ide manusia, selalu ada sosok ideal terhadap sesuatu yang merupakan kehendak Tuhan sebagai *kausa prima*, sebab utama yang memberikan ide-ide itu kepada manusia. Anggapan Plato yang demikian mengandaikan bahwa sesungguhnya manusia membawa spirit ketuhanan dalam dirinya sejak lahir. Dalam keseharian melalui penginderaan kita sering menyaksikan perubahan-perubahan bentuk beberapa benda yang merupakan manifestasi kreasi manusia, tetapi perubahan-perubahan bentuk tersebut tidak mengusik wujud ideal yang ada dalam pikiran manusia. Ini yang menjadi prinsip ide Plato.

sebaliknya interaksi dengan mesin dan produksi massa menyeret manusia ke nalar teknologis telah membuat manusia hidup dalam keadaan satu dimensi, yakni manusia yang kehilangan nalar kritisnya.

Sementara Aristoteles dengan pandangan empiris mendebat bahwa pandangan Plato tentang ide-ide adalah persoalan universal dan tidak substansial. Bukankah setiap makhluk memiliki cirinya tersendiri dan tidak mungkin diuniversalkan (Russel, *ibid*): 221-222). Tiap individu adalah substansi atas dirinya, hanya ciri umum yang bisa universal. Perahu Nuh bagi Plato adalah ide awal, sementara Aristoteles mengatakan bahwa itulah pengalaman pertama manusia atas segala sesuatu. Manusia tidak dapat mengenal sesuatu sebelum ada sensasi inderawi.

Polemik diatas merupakan dasar argumentasi persoalan representasi. Apakah representasi ada sebagai awal atau ada sebagai lanjutan dari pengalaman-pengalaman yang membuyar. Representasi terus hadir, baik melalui ide-ide maupun melalui pengalaman empirik manusia. Sebuah lukisan misalnya, dapat dikatakan sebuah mimesis (imitasi) terhadap kejadian alam, seorang pelukis melakukan penggambaran terhadap realitas dimana seorang pelukis hadir. Ada juga yang mengatakan bahwa sebuah lukisan merupakan gambaran kegelisahan sang pelukis yang dituangkan ke dalam kanvas.

Dua cara pandang ini tidak begitu penting lagi untuk dipilih mana yang paling tepat. Yang penting adalah representasi yang diekspresikan baik melalui tindakan bertutur maupun dalam simbolisasi adalah proses kreatifitas manusia dalam mengelola suasana batinnya untuk mengatasi keterbatasan fisik sebagai kodratnya. Suasana batin bisa muncul dari persoalan yang dicerap indera, bisa juga berupa ide-ide yang menjadi keinginan untuk diwujudkan. yang dikelola berupa rekaan masa depan. Karena dua dasar pemikiran itu pula dalam seni rupa melahirkan beberapa aliran sebagai apresiasi terhadap ide dan pengalaman. Realisme dianggap sebagai aliran yang merekam realitas inderawi dengan nyaris sama, sementara yang tidak tertarik dengan cara seperti itu mendalami cara abstrak untuk merepresentasikan kegelisahannya.

Apa yang menjadi bahan dasar dari kreasi tersebut, di sinilah pentingnya mengetahui imajinasi sebagai daya untuk membentuk gambaran atau konsep-konsep mental yang tidak secara langsung didapatkan dari proses penginderaan (Tedjoworo, 2001: 21). Imajinasi merupakan proses penyusunan forma-forma kehendak yang berada dalam ruang batin manusia. Ia umumnya diterapkan pada suatu proses mental, bukan pada proses visual-jasmaniah yang dilakukan ketika itu juga oleh manusia. Namun kelak akan tampak bahwa proses visual-jasmaniah tertentu dapat diimajinasikan, meskipun imajinasi tetap tidak sama dengannya (Tedjoworo, *ibid*: 22). Imajinasi terletak dalam proses mental manusia, bagaimana proses awal, forma-forma yang ditimbulkannya sepanjang berada dalam mental manusia dan berpotensi melahirkan sesuatu di ruang fisik. Itulah imajinasi. Imajinasi akan berhenti ketika melewati ambang ruang fisik, ketika ia divisualisasikan atau diverbalisasikan, ia berhenti sebagai imajinasi dan menjadi perwujudan, representasi dan bukan imajinasi itu sendiri. Jadi representasi merupakan pengandaian-pengandaian tentang arketipe alam ideal yang diolah di wilayah mental imajinasi, diwujudkan ke ruang fisik dan dalam perjalanannya mengalami distorsi.

Kalau Plato mengatakan bahwa dunia ide manusia dipenuhi oleh forma atau *blue print* alam semesta yang memberinya daya imajinasi. Maka Sigmund Freud melalui pendekatan empirik psikoanalisa mengungkap tentang alam bawah sadar manusia. Jika Plato menemukan arketipe dalam ide manusia, maka Freud mengatakan bahwa alam bawah sadar manusia sesungguhnya dipenuhi oleh libido, semua problematika seputar seksual (Baudrillard, 2000: ix-8). Menurut Freud, sejak lahir manusia sudah harus bersaing merebut perhatian (cinta) dengan orang tuanya. Anak laki-laki harus bersaing dengan ayahnya untuk merebut cinta sang ibu, demikian sebaliknya. Ini merupakan bentuk pengalaman pertama manusia, pengalaman atas rangsangan dan cinta. Melalui motif

itulah Freud selanjutnya mendiagnosa kecenderungan psikologis yang dikenal dengan *Oedipus Complex*. Ini diambil dari kisah klasik Oedipus yang membunuh ayahnya untuk memperistri *Jocaste* ibunya (Ahimsa Putra, 2001: 101-107). Freud mengangkat kisah ini untuk menggambarkan persoalan bawah sadar manusia yang dipenuhi oleh motif birahi “ia muncul di mana saja kecuali dalam simulasi yang sudah umum. Ia adalah hantu hasrat nafsu yang selalu mengejar realitas yang sudah mati. Ia ada di mana-mana kecuali dalam sex itu sendiri” (Baudrillard, op cit: 8). Kondisi bawah sadar manusia yang penuh dengan kompleksitas birahi serta kompleksitas manusia itu sendiri kemudian memandang sebagai persoalan yang harus diatur secara ketat dan memunculkan tabu *incest* (hubungan sedarah) yang dimaksudkan untuk mengatasi kecenderungan *Oedipus Complex* manusia. Selanjutnya pengaturan tersebut menjadi semakin berkembang setelah mendapat pembenaran secara medis.

Dalam proses representasi, imajinasi dan kesadaran manusia belumlah cukup. Kehadiran bahasa menjadi sangat penting sebagai kendaraan yang akan mengangkut imajinasi menembus ruang fisik. Bahasa mewujudkan imajinasi dari ruang mental ke ruang sosial. Tanpa tindakan berbahasa imajinasi menjadi tidak berdaya, karena bahasa salah satu medior untuk mengungkapkan kehendak manusia. Dalam satu rangkaian linier bahasa menemukan imajinasi, menjemputnya di ujung proses mental manusia dan menerjemahkannya menjadi simbol maupun ungkapan verbal. Pertautan antara instalasi imajinasi dengan kompleksitas bahasa melahirkan representasi. Bahasa dalam konteks ini tidak hanya sebatas pada ujaran verbal semata, tapi meliputi segala sesuatu yang dapat menerjemahkan imajinasi, kemudian dibaca sebagai media representasi termasuk simbol dan proses signifikasinya.

Sebagai sarana representasi mental manusia, bahasa menjalankan fungsi meliputi tugas penamaan, penghubung dan pengaturan hidup (Mulyana, 2001: 243-244). Sebagai penamaan, bahasa membantu

manusia untuk menunjukkan sesuatu yang diacu oleh sebuah kata. Fungsi penamaan pada bahasa mengantarkan pemahaman akan benda-benda dan ciri fisik serta sifat-sifatnya yang dirangkum dalam satu nama yang mengacu pada ciri tersebut meskipun penamaan bukanlah realitas itu sendiri, bahasa hanya menamai, menafsirkan. Sebagai fungsi penghubung, bahasa membantu manusia dalam proses komunikasi, membentuk pemahaman bersama melalui pemaknaan yang diacu bersama. Sedangkan fungsi pengatur hidup dapat kita lihat pada penggunaan bahasa terhadap tata aturan sosial, penetapan pola interaksi serta pola-pola etika dalam masyarakat tertentu. Bahasa merupakan “kontrak sosial” manusia paling awal.

Selain itu, bahasa juga memiliki keterbatasan. Pertama, keterbatasan secara kuantitas untuk mewakili seluruh obyek dan fakta. Kenyataan ini menegaskan bahwa keberadaan benda mendahului bahasa. Bahasa dimunculkan untuk menghadirkan suatu obyek dalam aktivitas verbal manusia. Paralel dengan tesis Immanuel Kant tentang *das ding an sich* (benda ada karena benda itu sendiri). Bagi Kant bahasa tidak mampu menghadirkan realitas, bahasa hanya mampu mendekati, menghadirkannya menjadi fakta bahasa melalui cara penafsiran. Sehingga kehadiran realitas melalui bahasa sangat ditentukan oleh subyek yang membawa bahasa, bagaimana ia memandang serta kepentingan-kepentingan dari verbalisme tersebut.

Kedua, bahasa membawa sifat ambigu sehingga sangat mungkin dikelirutafsirkan. Karena bahasa menjadi media representasi, persepsi dan interpretasi yang sangat bergantung pada konteks ruang-waktu. Indonesia yang dibangun di atas keragaman etnis dan bahasa serta hubungan diantara keduanya berupa mental bahasa bisa menimbulkan kerumitan komunikasi. Kemiripan-kemiripan tersebut juga ingin membuktikan bahwa sebagai fungsi sosial, bahasa tidak lepas dari proses relasi dan penyebaran. Kontak-kontak sosial memungkinkan bahasa untuk ditularkan, meskipun setelah itu menimbulkan distorsi dan ambigu.

Keterbatasan bahasa yang ketiga adalah sifatnya yang mengandung bias budaya, dalam hal ini bahasa menunjukkan suatu dunia simbolik yang khas, yang melukiskan realitas pikiran, pengalaman batin dan kebutuhan pemakainya (Mulyana, *ibid*: 245-251). Sifat bahasa seperti ini dapat kita lihat pada lingkup sejarah dan budaya. Bahasa sering digunakan sebagai media perlawanan atau setidaknya merupakan peneguh identitas yang berbeda di setiap tempat. Di masa pra Indonesia perlawanan melalui bahasa dapat dilihat pada gerakan Djawa Dipa yang memperjuangkan kesetaraan masyarakat yang bebas dari stratifikasi feodalistik melalui kampanye penggunaan bahasa Jawa *ngoko* untuk berkomunikasi (Supartono, 2000). Atau dapat diperiksa pada kecenderungan mitos yang mengikuti keadaan lingkungan suatu masyarakat. Cerita-cerita di seputar mereka merupakan tindakan bahasa untuk mengakrabi lingkungannya. Demikianlah, bahasa mencerminkan alam dimana bahasa itu lahir dan mengatasi keterbatasan dan keresahan pemakainya. Bahasa adalah media bagi realitas, bukan realitas itu sendiri.

Sebagai media representasi imajinasi dan proses mental manusia lainnya, bahasa juga memperlihatkan ciri-ciri berikut: 1) Bahasa selalu mengandung unsur negatif yang membuat setiap deskripsi pengalaman menjadi penciutan pengalaman; 2) Bahasa selalu membawa kemungkinan generalisasi; 3) Bahasa cenderung mendefinisikan realitas (Tedjoworo, 2001: 27-29). Ketiganya merupakan proses verbalisasi, sedangkan ciri deskriptifnya sebagai proses representasi. Apa yang diverbalkan atau dideskripsikan bukanlah realitas itu sendiri. Upaya-upaya tersebut merupakan proses penafsiran yang mengacu pada obyek untuk menghadirkannya dengan menceritakannya dengan sangat rinci.

Disini ditemukan peran bahasa yang ambigu yang harus menghadirkan sesuatu sekaligus dapat menghilangkan sesuatu. Kejadian dalam ruang mental manusia membutuhkan bahasa sebagai kendaraan ke ruang waktu tertentu, tetapi bila diteruskan menuju

pendefinisian secara rinci, maka realitas menjadi hilang (tidak berarti), yang muncul kemudian adalah apa yang diistilahkan Ludwig Wittgenstein sebagai *language game* (permainan bahasa). Bahasa kemudian menjadi metafora. Puisi misalnya mampu memperlakukan bahasa sebagai satu metafora yang memiliki ruang misteri dan mengundang penafsiran, rekaan kemungkinan realitas tak terbatas. Berbeda dengan sebuah reportase dimana bahasa digunakan sebagai penggambaran realitas senyata-nyatanya. Akibatnya adalah, tertutup kemungkinan bagi pembaca untuk menciptakan realitas kreatif, sebab semuanya telah digambarkan. Tidak terdapat minat atau keinginan untuk mengetahui realitas yang lebih dalam. Sehingga kekuatan bahasa akan terlihat apabila mampu menawarkan banyak kemungkinan, kaya imajinasi.

Karena sifat yang demikian sehingga bahasa hadir tidak hanya sebagai verbalisasi semata, tetapi membawa acuan dan motif bahasa. Bahasa menggambarkan dan mengacu pada satu keadaan tertentu yang dipengaruhi baik oleh penuturnya maupun oleh para pengguna bahasa tertentu. Kecenderungan demikian menyebabkan bahasa bukan sebatas tindak verbalisasi tapi juga membawa motif sebagai petanda (*signified*) dan penanda (*signifier*). Penanda adalah bunyi yang bermakna dan mengacu pada obyek yang disebutnya paralel dengan fungsi penamaan, sedangkan petanda adalah gambaran mental berupa pikiran atau konsep dimana bahasa itu hadir (Kurniawan, 2001: 30).

Instalasi bahasa lebih rumit dari apa yang dibayangkan selama ini. Banyak fungsi, nilai serta kepentingan yang terjalin rumit saat melakukan tindakan verbal. Menyangkut kepentingan manusia sebagai penutur juga sangat berpengaruh dalam bentuk representasi. Sebagai makhluk psikis yang antroposentris, manusia cenderung selalu menghadirkan dirinya (juga proses mentalnya) dalam verbalisasi dan signifikasi. Manusia selalu ingin memiliki, mengidentifikasi dan menamai ruang fisik (Mc Cloud, 2001). Itulah sebabnya mengapa secara tidak sadar lahir karya yang menjadi penggambaran

penuturnya. Dalam proses kreasi, sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan aktualisasi jiwa. Tindakan komunikasi tidak lain merupakan upaya mewujudkan kondisi kejiwaan pelakunya.

Dapat dipahami bahwa bahasa hadir tidak hanya membawa sosoknya, tapi juga menyertakan proses mental dan merekam suasana alam lingkungan tempat bahasa itu hadir. Bahasa di wilayah pesisir melahirkan gaya bertutur pesisir yang menyatukannya dengan alam. Demikian pula dengan orang pegunungan melahirkan bahasa yang akrab dengan alam pegunungan yang menjadi pengikat dan identitas komunitas pegunungan. Di sinilah bahasa hadir sebagai media representasi dari lingkungan fisik dan lingkungan mental penuturnya. Keadaan alam melahirkan bahasa untuk menerjemahkan dirinya dan menggambarkan keadaan penuturnya. Sampai di sini dapat tergambarkan bangun instalasi munculnya representasi di lingkup bahasa yang menjadi bahan utama tindakan bertutur.

Dari penjelasan kronologis yang cukup gamblang mulai dari bagaimana persoalan manusia dengan proses mentalnya, kemudian membentuk imajinasi yang dibahasakan, melahirkan representasi yang berupa mitos dan produk bahasa lainnya dapat kita menarik benang merah bahwa tindakan komunikasi tak lain dari persoalan keterbatasan kemampuan manusia dan bagaimana keterbatasan tersebut direpresentasikan. Jalinannya adalah, relasi antar sesuatu, peta konseptual dan bahasa atau simbol yang jalin menjalin.

Bahasa yang lahir selanjutnya menjadi teks yang dibahasakan, kemudian terus menerus mengalami pembesaran makna. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa tidak ada yang mampu menghentikan bahasa setelah menjadi milik bersama (*public domain*). Dalam konteks ini tidak penting siapa yang berfungsi sebagai pengarang (*author*), walaupun ada, pengarang dalam istilah Barthes telah dimatikan (*the death of author*). Teks yang berupa representasi kemudian menjadi milik bersama, menjadi alat budaya kemudian menjadi kesepakatan-kesepakatan yang akan mengatur tata kehidupan segenap penggunaanya, pusarannya

semakin membesar seiring perputaran waktu, serpihannya tersebar di mana-mana, menjadi tindakan komunikasi yang menghubungkan manusia satu sama lain.

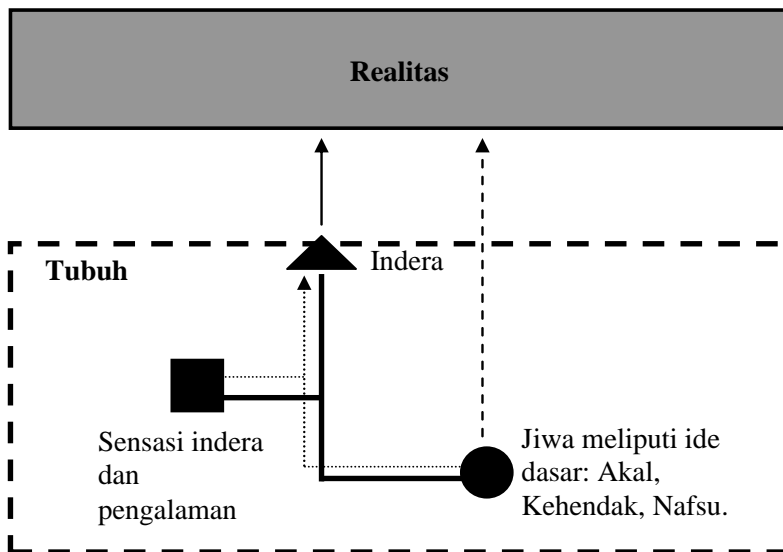
Proyeksi dalam Humanisme: Representasi dari Keterbatasan Tubuh

Humanisme sebenarnya berakar pada persoalan dualisme antara raga (materi) dan jiwa (immateri) dalam studi tubuh yang ramai di permulaan abad XX, meskipun persoalan tubuh sudah jauh dibicarakan sebelumnya. Akar dari studi tubuh tidak lepas dari polemik Plato dengan Aristoteles seperti telah dikemukakan sebelumnya. Yang perlu diluruskan adalah terdapat kesalahpahaman besar dalam melihat humanisme. Humanisme sering dianggap sebatas rasa kemanusiaan secara parsial, tidak melihat secara holistik bahwa instalasi tubuh manusia merupakan rangkaian sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Sehingga tubuh merupakan pintu untuk memahami humanisme secara holistik.

Ada tiga aliran dari Yunani klasik tentang tubuh, pertama yang dikemukakan oleh Cyrenaic yang percaya bahwa kebahagiaan tubuh jauh lebih baik daripada kebahagiaan mental. Sebaliknya Epicurus mengatakan bahwa kebahagiaan tubuh memang bagus, tetapi jauh lebih bagus lagi kebahagiaan mental. Sedangkan aliran ketiga yang awalnya kurang populer tetapi banyak berpengaruh dalam studi tubuh sampai sekarang adalah yang dikemukakan oleh Orpheus yang menyebutkan bahwa tubuh adalah kuburan bagi jiwa (*the body is the tomb of the soul*) ketiga bentuk aliran di atas secara sepintas sering membingungkan orang awam, bagaimana membedakan dan mengidentifikasi ketiganya. Kemudian bagaimana memahami perbedaan antara kesenangan badani dengan kesenangan jiwa.

Berbeda pada masa klasik, maka pada masa helenis pemahaman terhadap tubuh terbagi menjadi dua kelompok besar, dan Plato serta Aristoteles kembali harus kita sebut. Dalam memandang tubuh Plato

tidak menafikan kehadiran dualisme tubuh antara jiwa dan raga. Ia menganggap bahwa jiwa mempunyai eksistensi sendiri terpisah dari eksistensi raga, jiwa dapat menampilkan ekspresinya tanpa harus dipengaruhi oleh kondisi ragawi atau dengan kata lain jiwa memiliki sifatnya sendiri yakni kekal dan memiliki segala sesuatu tentang ide dan kebenaran. Sedangkan raga yang terdiri dari materi dimana ekspresinya sangat ditentukan oleh kemampuan indera melakukan sensasi. Hanya saja indera manusia memiliki banyak keterbatasan, dan karena ia adalah bagian dari tubuh indera juga mengalami pengurangan fungsi sesuai perjalanan waktu. Manusia berubah sepanjang perjalanan waktu, terjadi penyusutan dan distorsi terhadap tubuh sebagai raga, tetapi dibalik semua itu jiwa manusia tetap abadi, memahami apa yang sudah tertanam dalam ide, tidak berubah. Berikut diagram yang bisa menggambarkan hubungan antara kompleksitas tubuh berhadapan dengan realitas:



Catatan: Disarikan dari Jostein Gaarder, *Dunia Sophie*, Penerbit Mizan, Bandung, 1996.

Diagram di atas memperlihatkan bagaimana raga dan jiwa yang terletak dalam tubuh melakukan interaksi dengan realitas. Indera sebagai elemen penting tubuh merupakan ujung tombak untuk melakukan interaksi berupa identifikasi, penamaan dan penilaian terhadap realitas. Indera pada diagram yang dikemukakan oleh Plato merupakan eksistensi tersendiri yang memiliki kemampuan berdasarkan pada sensasi indera itu sendiri, pengalaman serta pasokan dari pertimbangan jiwa yang telah memiliki ide dasar. Penilaian akhir yang diberikan oleh raga yang merupakan ramuan antara pengalaman dan ide dengan melibatkan tubuh sebagai medior. Sehingga penilaian yang berdasar pada perpaduan ketiga unsur tersebut adalah penilaian subyektif yang ditentukan oleh kemampuan tiap-tiap individu. Kasadaran akan keterbatasan indera maka pada perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut manusia mulai menciptakan alat bantu atau teknologi untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Pengembangan seperti itu merupakan perluasan dari cara pandang Aristoteles dalam memahami tubuh.

Sementara apa yang ditawarkan Plato terhadap penilaian realitas adalah mengutamakan ide-ide yang telah dimiliki manusia dan mengandung *arketipe* alam semesta semenjak lahir. Bagi Plato, penilaian yang mengandalkan perpaduan ide dan keterlibatan tubuh cenderung mereduksi kebenaran hakiki menjadi kebenaran subyektif. Ia lebih mengutamakan pemanfaatan ide-ide dasar yang telah dimiliki manusia untuk menjatuhkan penilaian terhadap realitas. Pertimbangannya menggunakan ide itu sendiri dan semaksimal mungkin menekan keterlibatan penilaian sensasi indera dan pengalaman yang telah tersimpan sebelumnya. Dengan demikian apa yang dihasilkan akan lebih murni menyuarakan ide, kebenaran ideal, keindahan ideal dan lain-lain, dan ide-ide tersebut sudah ada dalam diri tiap manusia serta bentuknya sama, tinggal bagaimana memanfaatkan ide-ide tersebut.

Dengan menggunakan skema di atas dapat dipahami apa yang dimaksudkan tiga aliran tentang tubuh yang muncul dari masa Yunani klasik. Kita dapat memilah bahwa yang dimaksud dengan kesenangan tubuh dari *Cyrenaic* adalah kesenangan yang ditimbulkan dengan memanfaatkan indera dan keterlibatan tubuh secara maksimal, kebahagiaan jiwa oleh *Epicurus* dimaksudkan sebagai ekspresi hidup yang mengutamakan pemanfaatan jiwa secara penuh dengan menggunakan pertimbangan ide-ide dasar manusia. Tafsiran inilah yang dikembangkan dan dipertajam oleh Plato. Kemudian bagaimana dengan pendapat Orpheus bahwa tubuh adalah kuburan bagi jiwa. Aliran ini meski ketika itu kurang populer, tetapi mengandung persoalan panjang sampai memasuki abad pertengahan.

Di abad pertengahan persoalan tubuh banyak dibicarakan dari sudut theologis sebagai eksese hegemoni gereja terhadap ilmu pengetahuan. Melalui Thomas Aquinas (1225-1274) tubuh mendapat perhatian besar. Dengan meneruskan teori Aristoteles (meski tidak seluruhnya), Aquinas mengalami pencapaian berarti terhadap pemahaman dualisme tubuh manusia. Sebagai Aristotelian, jelas bahwa ia tidak menolak dualisme tubuh manusia, bahkan mengatakan bahwa dualisme tubuh harus dilihat sebagai satu kesatuan yang memiliki hubungan antara bentuk (*forma*) dan materi (*penyusun*) yang saling berhubungan satu sama lain. Ia menolak eksistensi jiwa yang terpisah, jadi manusia itu satu substansi saja, sedemikian rupa sehingga jiwalah yang menjadi bentuk badan, atau jiwalah yang membuat tubuh menjadi realis (*anima forma corporis*).³ Ungkapannya semakin memperkuat pandangan terhadap tubuh yang sebelumnya masih dilihat secara parsial, setidaknya Aquinas meredakan polemik tubuh sejak masa klasik. Tubuh sebagai korpus memang tidak bisa disangkal secara empirik.

3 <http://www.FilsafatKita.com>

Kembali pada persoalan dasar apakah ide atau pengalaman yang lebih utama, tidak jadi penting bagi Aquinas, tetapi mengutamakan bagaimana penggunaan keduanya dalam kehidupan. Ungkapannya *Agere sequitur esse* (cara bertindak sesuai cara beradanya) ini menandakan bahwa tindakan merupakan gambaran dari pikiran yang juga adalah percampuran antara ide dan sensasi indera, interaksi keduanya.

Tetapi dalam soal kekekalan jiwa Aquinas bertentangan dengan Aristoteles yang menganggap bahwa jiwa mengikuti perubahan raga. Ia mengatakan bahwa jiwa manusia tetap, tidak mengikuti perubahan yang terjadi pada raga, pandangan ini mengambil pendapat Plato, ini disebabkan oleh latarbelakang Aquinas sebagai theolog katolik yang tidak ingin mengingkari paham kebangkitan roh yang telah berkembang lama dalam tradisi semit. Selanjutnya, pandangan penting dari Aquinas mengenai daya dari jiwa, ia mengatakan bahwa jiwa memiliki lima daya: daya vegetatif adalah daya yang berhubungan pergantian zat dan pembiakan; daya sensitif merupakan daya yang berhubungan dengan keinginan; daya yang menggerakkan; daya untuk berpikir; dan daya untuk mengenal.⁴ Untuk dapat berpikir dan mengenal, dalam diri manusia tersedia akal dan kehendak. Akal adalah daya tertinggi dan termulia bagi manusia. Akal lebih penting dari kehendak (*the will*) karena yang benar lebih tinggi daripada yang baik. Oleh karena itu mengenal jauh lebih sempurna daripada menghendaki. Persoalan mengenal dan menghendaki ini, nantinya menjadi perdebatan tersendiri dalam hal etika, terutama setelah abad pencerahan dengan munculnya pemikir yang menentang pandangan Aquinas di atas.

Sampai akhir abad pertengahan, dua dari tiga pandangan tentang tubuh manusia mengalami pendalaman dan perkembangan ditangan beberapa filsuf, sementara pandangan mengenai tubuh

4 *Ibid*

sebagai penjara bagi jiwa diperhadapkan pada persoalan-persoalan materil baru menjadi ramai setelah memasuki abad pencerahan (pasca renaissance). Mencermati dari awal dikemukakannya pandangan tersebut oleh Orpheus juga pernah dikemukakan oleh Pythagoras bahwa “jiwa adalah bagian zat ilahi yang terjatuh, tercemar dan terperangkap dalam tubuh seperti dalam sebuah kuburan dan terhakim untuk menjalani siklus kelahiran kembali yang tiada habisnya”, kemudian sedikit dibicarakan dimasa helenis oleh Plato. Di abad pertengahan juga pernah mendapat perhatian serius dari Fransiscus Asisi, tetapi cara pandangnya pada dikotomi para penguasa yang kaya dengan rakyat miskin. Selebihnya pandangan ketiga ini kurang mendapat perhatian karena belum ditemukannya bentuk-bentuk produksi benda-benda dalam skala besar yang bisa dikonsumsi manusia secara massal. Kehadiran produksi benda-benda dalam memandang persoalan ini penting untuk melihat apa yang dikemukakan Orpheus dan Pythagoras bahwa tubuh menjadi kuburan bagi jiwa dan bila mengikuti interaksi antara tubuh dan jiwa akan ditemukan jawaban bahwa penggunaan benda-benda secara maksimal oleh tubuh akan menciptakan kekuatan superioritas tubuh terhadap jiwa, demikian sebaliknya. Sebab itu pandangan ketiga tentang tubuh baru dapat digemakan lagi memasuki era pencerahan (*Aufklärung*) ketika manusia mulai menemukan alat produksi benda-benda dan para filsuf sudah mengendus persoalan yang ada dibalik percepatan tersebut.

Memasuki masa pencerahan dan lebih ramai lagi di era modern, studi tubuh mulai menelaah hubungan antara tubuh sehubungan dengan perubahan orientasi hidup setelah ditemukannya mesin-mesin produksi yang membuka peluang akses tubuh terhadap konsumsi, sehingga hubungan antara tubuh dengan realitas semakin kompleks.

Etika dalam Ruang Sosial, Munculnya Humanisme

Sampai di sini dapat dipahami bagaimana kompleksitas tubuh di satu sisi berhubungan dengan lingkungan tempat serakan realitas sebagai obyek sasaran tubuh atau realitas *an sich* untuk dipahami. Kita telah menemukan penjelas terhadap kompleksitas instalasi tubuh manusia melalui deskripsi sejak Yunani klasik sampai pada pandangan kaum modernis. Selanjutnya akan dilacak apa yang menjadi persoalan antara dualisme tersebut berhadapan dengan realitas (obyek/fakta). Dari diagram tentang cara tubuh dan jiwa mengapresiasi realitas telah menggambarkan keterbatasan tubuh serta terbentuknya jarak antara tubuh dengan realitas.

Jarak disamping menjadi penghubung antara tubuh dengan realitas, juga mengandung persoalan sangat kompleks. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa realitas adalah *das ding an sich* (ada atas dirinya sendiri). Sabda ini pertama kali dikenalkan Immanuel Kant untuk menjelaskan keterbatasan nalar manusia untuk menjangkau realitas yang bersifat metafisis. Dalam hal ini, jarak diartikan dalam dua bentuk, sebagai ruang imajinasi dan ruang kompleksitas nilai-nilai. Jarak sebagai ruang imajinasi merupakan ruang kreasi mental yang tak terbatas. Oleh karena berada di ruang mental manusia dan subyektif maka imajinasi dapat menghasilkan dan menjangkau apa saja. Ia tidak dibatasi oleh ruang itu sendiri, meskipun demikian imajinasi tetap tidak bisa mengatasi jarak untuk menjadi realitas. Dalam hal ini kekuatannya sama dengan bahasa, hanya mampu menghadirkan, mendefinisikan dan mengacu pada suatu realitas. Karena sifatnya yang subyektif, imajinasi di ruang mental tidak mempunyai hubungan dengan lingkungan. Sebab itulah imajinasi sering juga dikenali melalui representasi kreasinya yang tak terduga dan estetis.

Sebagai ruang kompleksitas nilai-nilai, jarak kemudian menjadi persoalan yang rumit dan jadi perdebatan yang tetap ramai sampai

sekarang. Dalam ruang kompleksitas nilai-nilai, jarak antara tubuh dengan realitas merupakan jarak fisik yang berjejak, sesuatu yang hadir dan berinteraksi dalam lingkungan fisik. Ruang ini melibatkan segala organisme yang ada dan berjejak di antara jarak. Di sini interpretasi manusia terhadap realitas menjadi rumit, semakin melibatkan banyak individu, realitas semakin rumit ditafsirkan. Intersubyektivitas ini kemudian melahirkan etika sebagai cara untuk mengatur lalu lintas relasi antar subyek. Cara kerja etika dalam pengaturan lalu lintas relasi adalah dengan memberi penilaian tentang yang baik dan tidak baik. Pertanyaan yang muncul kemudian, dari mana etika memperoleh kemampuan untuk menilai dua hal berbeda itu. Menjawab pertanyaan ini, Thomas Aquinas menggunakan teori ide dari Plato untuk mengemukakan akal budi dalam hukum kodrat. Aquinas mengatakan bahwa manusia saat lahir sudah membawa hukum kodrat yang mengetahui mana yang baik dan tidak baik. Kodrat adalah rangkaian struktur yang membuat sesuatu meng”ada”. Artinya sesuatu menjadi ada karena mengikuti apa yang menjadi kodratnya. Misalnya manusia memiliki kodrat tumbuh, sensasi dan kodrat rohani. Dalam kehidupan, manusia tidak melulu patuh pada kodratnya, ini disebabkan karena manusia memiliki kemampuan rasio yang selalu mencoba lepas dari batas-batas kodrat. Menurut Aquinas, manusia hanya bisa hidup dengan baik apabila menuruti kodratnya, dan akan menjadi kacau (*chaos*) apabila keluar dari jalur kodratnya.⁵

Bagaimana proses pengenalan manusia dengan hukum kodrat. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan mengambil konsep dasar jiwa manusia yang dikemukakan Sigmund Freud. Freud mengatakan bahwa bayi yang baru lahir adalah perwujudan dari *id*. Lambat laun *ego* berkembang dari *id* ini dengan bertambahnya usia yang menghasilkan pengalaman-pengalaman. *Ego* itu tidak dibimbing seluruhnya oleh prinsip kesenangan, tapi ia dikuasai oleh prinsip kenyataan yang memuat aturan-aturan. *Ego* sadar akan dunia sekelilingnya, dan mengakui

5 <http://www.FilsafatKita.com>, *Op Cit*.

bahwa kecondongan tak kenal aturan dari id itu harus ditahan untuk mengelakkan suatu bentrokan dengan masyarakat. Sebagaimana dilukiskan oleh Freud, *ego* itu adalah mediator antara kehendak-kehendak *id* yang liar dan kendali-kendali dunia luar. Karena dalam keadaannya, *ego* berlaku sebagai sensor terhadap keinginan-keinginan *id*, dengan jalan menyesuaikan kepada keadaan-keadaan yang realistis, dengan jalan menyadari bahwa pengelakan hukuman, bahkan kepentingan keselamatan diri sendiri, tergantung dari penekanan *id*. Tapi dari konflik antara *ego* dan id ini sering timbul neurosis atau frustrasi yang sering mengganggu manusia.

Akhirnya ada unsur ketiga dalam proses mental, yaitu *superego*, yang secara umum dapat dirumuskan sebagai sanubari. *Superego* adalah evolusi mental tertinggi yang dicapai oleh manusia, dan terdiri dari endapan-endapan dari segala larangan-larangan, segala tatakrama yang diajarkan kepada seorang anak oleh orangtuanya dan segenap representasinya (Adlin dan Suryolaksono dalam Jurnal Psyche, Vol 1).

Freud sependapat dengan Aquinas bahwa manusia tidak selalu berada dan memiliki *superego*-nya, karena manusia memiliki pertikaian bawaan dualisme tubuh. Dalam keadaan tak terdamaikan, *chaos* dari dualisme tubuh sering mengunggulkan *ego* sebagai wujud keakuan eksistensial wujud kebenaran subyektif yang selalu dirindukan manusia. Dalam balutan rasa rindu, manusia seringkali menyisihkan *superego* untuk mencapai dan memuaskan fantasi *ego*. Freud mengambil pengandaian peristiwa Oedipus yang membunuh bapaknya untuk memperisteri ibunya. Peristiwa ini sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai fakta patologis yang mendominasi pandangan mutakhir tentang konsep Freud. Terbunuhnya sang bapak adalah proses penyingkiran *superego*. Sementara bersandingnya Oedipus dengan ibunya merupakan puncak pencapaian *ego* menyatu dengan ke-aku-an dalam tubuh manusia.

Dalam konteks lokal, bagaimana Sangkuriang merangsek menerjang tabu (representasi *superego* yang dipintal melalui jejaring etika) dan mengejar-ngejar Dayang Sumbi ibunya untuk dipersunting. Kegeraman Sangkuriang yang tidak dapat mengejar ibunya kemudian dilampiaskan dengan menendang sebuah perahu dan menjelma menjadi gunung “Tangkuban Perahu” merupakan simbolisasi dari frustrasi. Frustrasi disini merupakan simbolisasi dari *neurosis*, keterbatasan aktualisasi *ego* manusia berhadapan dengan realitas sosial yang sarat dengan etika. Sementara proses pelarian Dayang Sumbi kemudian menjelma menjadi sebatang padi, merupakan simpul mitis yang menjadi simbol keterbatasan *ego* manusia untuk menembus ruang sosial yang dibentuk oleh tatanan. Kemudian menjadi peringatan bahwa tabu adalah sebuah rasionalitas yang memiliki eksistensinya sendiri dan tidak bisa ditembus/dilanggar oleh kehendak rasionalitas subyektif manusia.

Apa konsekuensi bagi manusia atas penentangan kodrat, alam dan pengelolaan hidup manusia senantiasa menjaga harmoni dengan sendirinya, ia bekerja atas hukum alam yang teratur. Sampai disini, etika (proses transformasi perahu menjadi gunung dan tubuh Dayang Sumbi menjadi batang padi dapat disandingkan dengan “sintesis *a priori*” Kantian yang mengatakan bahwa realitas hanya bisa didekati dengan pertautan antara ide dasar dengan pertimbangan rasio obyektif (perifikasi dan falsifikasi). Dengan kendaraan itulah manusia mengembangkan hidupnya dan menjaga eksistensi atas guncangan-guncangan *ego*. Dalam konteks relasi sosial proses penjagaan ini memerlukan apa yang disebut konsensus/kesepakatan, sebagai kontrak bersama untuk memberi nilai (baik/buruk) terhadap fenomena-fenomena yang hadir di ruang fisik manusia yang selalu berdialektika, berubah seiring perkembangan peradaban.

Nietzsche: Lari dari Tubuh untuk Pembebasan Jiwa

Friedrich Nietzsche hadir di akhir abad ke-19 sebagai humanis paling radikal yang pernah ada. Nietzsche yang dibesarkan dalam

tradisi Lutheran sudah mengenal bentuk-bentuk perlawanan dalam tradisi nasrani. Ia hadir ketika eropa khususnya Jerman mulai memperlihatkan hasil dari revolusi industri dengan harapan kehidupan manusia yang lebih makmur. Revolusi industri sendiri merupakan puncak pencapaian rasionalitas eropa. Melalui industrialisasi, segala segi kehidupan manusia dirasionalkan, ditentukan ukuran-ukurannya termasuk bagaimana partisipasi manusia dalam mesin-mesin industri tersebut. Dalam logika industri, manusia tidak dilihat sebagai kompleksitas jiwa dan tubuh tetapi dilihat sebagai salah satu komponen yang menyebabkan mesin bekerja. Manusia diibaratkan sebagai salah satu sekrup kecil dalam rangkaian mesin raksasa. Keadaan ini pula membentuk stratifikasi masyarakat industri (borjuis – proletar) menggantikan model-model feodal. Pola industri juga mengubah tatanan ekonomi dari kapitalisme perdagangan ke kapitalisme industri (Sanderson, 1993: 167-172). Terjadi massifikasi produksi dari volume kerja mesin yang padat dan meluas, sehingga mengubah pola interaksi masyarakat. Bentuk hubungan juga berubah, secara vertikal hubungan buruh – majikan menjadi bentuk hubungan hierarkis dimana majikan melihat buruh bukan lagi sebagai manusia, bagian dari masyarakat, tetapi dilihat sebagai salah satu komponen industri. Secara horisontal menjalin hubungan dengan mesin yang beku, kemudian berimplikasi dengan sesama buruh, sesama komponen mesin yang juga diam. Industri sebagai hasil rasionalisme dan humanisme ternyata menciptakan dehumanisasi. Industri sebagaimana awalnya diharapkan untuk menyejahterakan manusia malah berbalik memperbanyak jumlah masyarakat miskin, dan majikan menjadi semakin kaya akibat penumpukan kapital dari upah buruh yang diminimalkan. Kota dijejali kaum miskin dan gubuk tempat para buruh. Pencerahan manusia akhirnya menghasilkan absurditas.

Dalam keadaan serba absurd Nietzsche hadir dengan aporisma-aporismanya, ia menyangkal rasionalitas pada jarak antara manusia

dengan realitas. Baginya jarak tersebut telah mengkondisikan manusia untuk menciptakan aturan-aturan berupa etika dan rasionalitas ilmu yang mereduksi semangat kemanusiaan tak terbatas. Berikut ini salah satu aporisma Nietzsche:

“O kawan! Dengarkan dandang laguku! Lagu lama dari nalar yang kalian nyanyikan itu tak lama lagi bakal padam. Lihatlah agama sahabat klasik nalar itu, telah ditelan oleh bumi. Tuhan yang dulu kalian puja kini telah mati. Metafisika telah dibungkam oleh Kant yang saleh itu. Epistemologi, pengetahuan dan etika, yang serba analisis, prinsip berirama dan membosankan itu... telah kucium juga akan mati. Inilah, telah datang sebuah zaman untuk menyambut laguku yang mendendangkan kebebasan paripurna, kebebasan yang akan membakar tetekebengek prinsip-prinsip, aturan-aturan, kategori-kategori ciptaan nalar. Nalar telah membelenggu kalian selama ini, dan kini aku membawakan api kebebasan untukmu. Mari kita puja Dionysian, dewa api yang membakar segala keteraturan dan batasan pengertian. inilah zamanku, zaman penuh gairah, dan hasrat mengebu yang mengoyak-ngoyak tatanan nilai dan tradisi.” (Hariyanto, 2003).

Aporisma Nietzsche menggugat dua hal penting, absolutisme dalam institusi agama dan pelebagaan nalar melalui ilmu pengetahuan. Ia melawan semua itu dengan alasan bahwa eksistensi dua sistem tersebut telah menjauhkan manusia dari realitas hidupnya. Nietzsche ingin mengatasi jarak antara entitas tubuh dengan realitas yang mengakibatkan positifikasi, bahkan meniadakannya. Ia menentang etika sosial dengan mengajukan model etika asketisme,⁶ dimana manusia harus mengabaikan pertentangan dualisme tubuh, mengunggulkan jiwa untuk mengatasi jarak kemudian

6 Asketisme adalah salah satu aliran dalam filsafat yang cenderung mengabaikan kesenangan tubuh. Aliran ini mengalami puncaknya di abad pertengahan dan awal pencerahan. Di abad pertengahan, Fransiscus dari Asisi merupakan tokoh asketis dihormati yang memilih hidup miskin untuk menyatu dengan kehidupan dan kebebasan jiwa. Pada kasus tertentu ada juga penganut asketis yang memilih dikebiri untuk menampik sex. Di abad pencerahan Jeremy Bentham dikenal lewat kekukuhannya untuk tidak menikah dan menolak sex yang dianggapnya dapat mengotori nalar manusia. Bagi Nietzsche Asketisme digunakan untuk menekan fungsi tubuh yang cenderung mengobyektifkan sesuatu dan lebih memenangkan jiwa untuk menyatu dengan realitas. Dengan demikian manusia dapat menemukan kodratnya sebagai mahluk unggul.

menemukan kediriannya yang menyatu dengan kosmos. Nietzsche mengemukakan bahwa apa yang dihasilkan dari rasionalitas Kant ternyata tidak lebih bagus dari masa-masa sebelumnya, sebab moral yang yang dikedepankan pada proses penalaran tak lebih dari proses penghisapan arus hidup itu sendiri. Moralitas menjadi kodifikasi dari kekuatan yang memudahkan hidup (Sunardi, 1999: 79). Jelas bahwa Nietzsche menentang rasionalitas dan mengutamakan imajinasi serta perwujudannya semaksimal mungkin menjadi rasionalitas asketis. Hanya dengan maksimalisasi imajinasi dan kesenangan, manusia bisa menemukan ego sebagai intisari manusia.

Sebab itulah Nietzsche mengajukan bentuk etika asketisme sebagai pergulatan dua dewa Apollo (dewa yang menjaga segala keteraturan hidup) dan Dionisus (dewa anggur, penganjur keriang). Lewat Apolonian manusia dianjurkan untuk mengelola hidup dengan penuh keteraturan, sedang dengan Dionisian manusia dipersilakan menikmati keriang hidup tanpa batasan. Pertemuan dua titik inilah yang dikenal sebagai proses nihilisme untuk menemukan pribadi *übermensch*. *Übermensch* adalah bentuk manusia yang diidealkan Nietzsche sebagai simpul *chaos* dalam hidup manusia untuk mengatasi sifat kebinatangannya (Sunardi, *ibid*: 41). Meskipun Nietzsche menolak alam yang tidak dapat diukur (*neomena*) dan bertumpu penuh pada alam fisik manusia (*fenomena*) namun ia tidak bisa sepenuhnya lepas dari peristiwa fisis manusia. Bagi Nietzsche kedudukan manusia mempunyai kemampuan untuk menciptakan tujuan dan nilai yang tidak dipunyai oleh binatang. Manusia yang tidak menggunakan kemampuan ini disebutnya sebagai manusia barbar. Dia tetap berada dalam status kebinatangan (*ibid*: 68). Pertentangan-pertentangan yang digambarkan sebagai *chaos* dalam diri manusia antara *apolonian* dengan *dionisian* dimana manusia harus mampu mengelola kekacauan-kekacauan tersebut melalui semangat yang disebut *Der Wille zur Macht* (*the will to power*, kehendak untuk berkuasa). Cara pandang Nietzsche tersebut memaparkan peluang-

peluang manusia dalam menemukan jati diri dari ketidakpastian yang diibaratkannya seperti sebuah pelayaran di tengah lautan tak berpulau yang membutuhkan kewaspadaan sungguh-sungguh. Pada keadaan seperti itu manusia harus memunculkan spirit kehendak untuk berkuasa sebagai jaminan satu-satunya untuk menegakkan jati diri.

Disinilah Nietzsche bertentangan dengan para rasionalis yang mengambil realitas dari entitas kosmos. Ia menganggap bahwa manusia harus mengabaikan jarak yang disesaki aturan dan menyatu dengan realitas, bermain dan menikmati sepenuhnya. Upaya Nietzsche kemudian dikenal sebagai upaya tak berjejak, sebuah perjalanan yang tidak bisa diukur kemudian dirasionalkan. Ia memang tidak mementingkan itu, sebab rasionalitas bisa berarti jebakan yang melantarkan kemanusiaan. Baginya yang utama adalah bagaimana menemukan sosok *übermensch*, pemberani yang menggenggam semangat kehendak untuk berkuasa (atas diri dan hidup). Untuk itu semua, manusia harus selalu berkata “ya” dalam segala pergulatan hidupnya. Ajaran Nietzsche dikenal sebagai anti rasionalisme obyektif yang membuat rasionalitasnya sendiri melalui aporisma dan penokohan *alter ego Zarathustra*, ia terus melakukan dekonstruksi terhadap rasio, menawarkan cara-cara tersendiri untuk menegakkan eksistensi dan kemuliaan manusia.

Proyeksi dalam Humanisme: Komunikasi, Kreasi dari Keterbatasan.

Bagaimanapun etika asketisme Nietzsche, ia tidak bisa meninggalkan Zarathustra, sosok yang dianggapnya sebagai manusia yang berhasil menemukan spirit *übermensch* dan *The Will to Power*. Zarathustra tak lain dari sosok alter ego Nietzsche.

Lalu apakah usaha manusia sia-sia dalam pengembaraan menemukan realitas. Seperti sebuah perjalanan yang meninggalkan jejak. Petualangan manusia pun yang menjejak tanah rasionalitas

menyisakan sinar pencerahan berupa kreasi dan pengetahuan. Manusia bisa mengatasi jaraknya dengan realitas, tetapi tidak bisa mengabaikannya apalagi meniadakan jarak tersebut. Itu berarti bahwa manusia tidak dapat mengabaikan kompleksitas nilai serta konsekuensi yang terdapat dalam jarak itu. Sehingga humanisme radikal yang dikemukakan Nietzsche dapat diterima hanya pada batas penerbitan kehendak manusia, atau setidaknya memberi pengetahuan dan membangun sikap. Pada terapan psikomotorik, pandangannya akan berbenturan dengan fakta sosial.

Humanisme Nietzsche juga mengabaikan kontradiksi atau oposisi dalam diri manusia karena pada dasarnya asketisme yang dianutnya meminimalkan keberadaan tubuh dan mengunggulkan jiwa dengan kemampuannya yang tidak terbatas. Manusia selalu membawa kontradiksi tersebut dalam mengarungi hidup. Manusia memiliki keinginan, harapan dan cita-cita. Walaupun keinginan manusia sering tercapai, tapi tidak jarang pula keinginan tersebut tidak tergapai. Fakta ini menimbulkan gejolak pada jiwa manusia, ekspresi kesenangan dan kekecewaan. Di sanalah manusia bermain sepanjang hidupnya. Permainan yang (meminjam istilah Geertz) berfungsi untuk menenangkan fluktuasi dalam kehidupan untuk mencapai tataran harmoni (Geertz, 83: 416-417).

Tentu saja Nietzsche menolak pandangan seperti itu. Sebab baginya hidup manusia ibarat pelayaran tanpa pulau dengan gelora gelombang yang senantiasa mengancam. Tetapi inti dari dua aliran ini sama, yakni bagaimana manusia senantiasa memelihara kesadarannya untuk senantiasa berjalan di atas nalar sehat. Geertz mengungkapkan bahwa perasaan manusia dari lahir sampai mati hanyalah kebahagiaan, kesusahan berganti-ganti tanpa henti. Kalau ada yang bertanya kenapa hidup ini hanya terdiri dari dua hal tersebut, maka jawabannya karena manusia hidup dengan kehendak. Kedua sifat tersebut adalah manifestasi dari kehendak. Manusia tidak bisa menanggalkannya, sebab melepaskan kehendak berarti

meniadakan manusia, dan disini manusia sering terjebak karena mengira bahwa salah satu dari keduanya bersifat abadi (Geertz, *ibid*).

Untuk mencapai sifat kesadaran dan kewaspadaan dalam kosmos jiwa, manusia perlu mengenali bentuk-bentuk dan kehendak yang menjadi kompleksitas batin sepanjang hidupnya. Dengan pengenalan bentuk sifat batin, manusia dapat merasakan, mengendalikan serta menjaga titik kesadaran. Kompleksitas entitas tubuh dengan ruang sosial bagi manusia merupakan tekanan-tekanan tersendiri. Ada kontradiksi-kontradiksi baru yang terjadi justru ketika manusia berinteraksi secara internal, lebih lagi dalam interaksi dengan ruang sosial yang dikendalikan dengan nilai dan etika. Ada harapan baru muncul, dengan tingkat pencapaian fluktuatif yang mempengaruhi jiwa manusia, sehingga komentar tentang siklus hidup manusia merupakan bentuk yang selalu ditemui, mengalami metamorfosa dan melahirkan problem kemanusiaan baru. Sifatnya seperti pendulum yang tidak pernah berhenti berayun di antara antara dua sifat manusia yang saling beroposisi.

Dalam proses pergerakan sifat manusia, tidak semua harapan dan keinginan manusia dapat tercapai. Apa yang dicita-citakan, kemudian tidak tercapai membuat manusia merasa kecewa. Demikian juga dengan pencapaian dan pemenuhan harapan, justeru sering membuat manusia merasa belum puas dan menganggap apa yang sudah diraih belum cukup. Setiap hari, bahkan sepanjang hidup manusia, gambaran sifat demikian merupakan kodrat manusiawi. Sehingga membuka peluang untuk senantiasa mengidealkan sesuatu.

Saat itulah bagi manusia, menjadi titik awal melakukan proyeksi. Proyeksi dalam humanisme adalah katup yang menjadi jalan keluar tidak bertemunya antara keinginan dengan pencapaian. Proyeksi juga merupakan puncak harapan, serta penggambaran manusia terhadap bentuk-bentuk ideal. Manusia selalu berupaya mengandaikan ada

sosok yang bisa atas segala sesuatu. Ada kemampuan agung yang dibayangkan manusia yang mampu mewujudkan semua keinginan yang diidealkannya, atau sering juga disebut *alter ego*, yakni sosok maya maha sempurna yang sanggup bertindak luar biasa dengan keistimewaannya.

Proyeksi-proyeksi kesempurnaan dan pengandaian sosok *alter ego* dibaca oleh Sigmund Freud sebagai desakan-desakan alam bawah sadar manusia yang tertekan yang sesekali mengakibatkan *neurosis*. Freud menganggap bahwa, neurotik, histeria juga fantasi muncul akibat dari ingatan-ingatan yang terkubur atau ditekan secara tidak sadar. Kejutan-kejutan tersebut bisa datang kapan saja dalam hidup manusia, tapi kejutan-kejutan ini paling besar datang dari masa kecil saat manusia masih penuh keterbatasan dan dipagari dengan aturan yang tegas dan rumit. Keterbatasan dan tekanan membuat alam bawah sadar manusia pada saat tertentu melahirkan fantasi sebagai kompensasi dari keterbatasan itu sendiri (Smith dan Raeper, 2000: 95-98).

Tekanan-tekanan bawah sadar manusia sesungguhnya ingin mengatakan bahwa fantasi lahir sebagai akibat dari keterbatasan dan kehendak manusia itu sendiri untuk menggambarkan atau kerinduan-kerinduannya terhadap apa yang belum pernah ditemui. Sebagai penggambaran, fantasi berpotensi menghasilkan pengetahuan yang lebih kabur, karena fantasi berkaitan dengan hal-hal yang tidak mungkin (Tedjoworo, 2001: 22-23), sebab ia berasal dari proses mental, dan dalam kondisi itu membuka peluang kepada kita untuk memproduksi sesuatu yang “irasional” seperti mitos, dongeng, tabu, legenda, dan lain-lain, yang meskipun “tidak rasional” namun dapat diterima dan diyakini manusia sebab telah melewati proses batin dan imajinasi yang tak terkira serta dapat dibenarkan secara subyektif.

Selanjutnya humanisme yang juga berlandaskan pada ide-ide awal Plato mengatakan bahwa ambivalensi yang dibawa manusia

sejak lahir antara keterbatasan fisik inderawi dengan kebebasan jiwa yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, pada proses lebih lanjut (proses budaya), ketika manusia memahami kerumitan alam dan keterbatasan dirinya dalam menghadapi dan mengelola fenomena alam, saat itulah manusia mulai berpikir bagaimana menemukan titik temu atas kebuntuan itu. Sejak itulah manusia mulai melakukan proyeksi atau penggambaran mengenai segala bentuk kebaikan/keteraturan yang dikehendaki kemudian diletakkan di ruang fantasi. Manusia mulai mengenal bahwa ada kekuatan besar yang mengatur kerja alam dan berada jauh di luar daya manusia. Akhirnya segala keluarbiasaan yang timbul dari rasa keterbatasan manusia itu diproyeksikan pada satu sosok luar biasa dan serba sempurna. Sejak saat itu manusia menemukan kesadaran religiusnya, menurut Ludwig Feuerbach, kebutuhan manusia akan agama dan eksistensi Tuhan merupakan fantasi pertama manusia melalui proses manusiawi seperti itu (Smith dan Raeper, *op cit*: 89).

Selanjutnya manusia menyadari terjadinya kesenjangan antara penemuan diri dengan hasil-hasil proyeksi imajinasi. Terbuka jarak di antara keduanya, dan kembali keleluasaan imajinasi manusia selalu berupaya untuk mencapai hasil-hasil proyeksinya. Untuk mengisi kekosongan ruang tersebut, manusia senantiasa menciptakan imajinasi baru yang berfungsi sebagai jembatan jarak. Produk “imjinasi antara” sebagai langkah kreasi psikis manusia lebih lanjut yang melahirkan karya-karya yang bersifat spiritual batiniah. Hasil imajinasi kemudian mempunyai dua fungsi, 1) berfungsi untuk menenangkan gejolak psikis manusia, 2) berfungsi untuk menjaga keutuhan imajinasi awal agar tidak terjamah oleh kemampuan indera manusia itu sendiri.

Pandangan Plato tentang *arketipe* yang menghuni dunia ide, dalam bahasa Feurbach merupakan puncak upaya proyeksi manusia. Manusia mengenal *arketip* sebagai alam yang serba teratur, sempurna, sementara dunia menjadi duplikasinya.

Adalah watak dasar manusia untuk melakukan kategorisasi dan kontradiksi terhadap hasil-hasil kreasinya, kemudian mengadakan penilaian dan perbandingan terhadap proses intelektual tersebut. Ada tempat serba sempurna berarti ada pula tempat penuh kekacauan, maka difantaskan pula alam sebaliknya tempat segala keangkaramurkaan sebagai puncak proyeksi atas segala bentuk kejahatan dan sifat-sifat destruktif manusia. Kemampuan ini diperoleh manusia melalui bakat kontradiksi atau oposisi biner bawaan manusia. Pendapat Feuerbach mirip dengan pandangan Levi Strauss. Strauss mengatakan bahwa sejak awal manusia merupakan sosok yang memiliki karakter instingtif dan bersifat puitis dalam cara ia memberikan respon terhadap dunia, suatu kebijakan-puitis (*sapientia poetica*), di mana mereka menyatakan cara pandanganya terhadap dunia lewat berbagai bentuk metafisik, metafora, simbol, dan mitos-mitos (Suryolaksono dan Adlin, Makalah tanpa tahun).

Jelas kemudian bahwa ketimpangan antara kondisi fisik dan laju psikis manusia yang tak terbatas berhasil menciptakan kreativitas proyeksi sebagai pendamai kebutuhan-kebutuhan batin manusia itu sendiri. Dari kompleksitas batin sepanjang hidupnya, manusia terus memproduksi, berinteraksi dan melakukan tindakan komunikasi yang menenangkan dialektika tubuh manusia, sembari membenamkan kehendak-kehendak ke bawah sadarnya, untuk selanjutnya menjadi kreasi yang tak pernah kering.

Referensi

Ahimsa Putra, Heddy Shri.

2001 "Strukturalisme Levi Strauss, Mitos dan Karya Sastra".
Yogyakarta: Galang Press.

Arsuka, Nirwan Ahmad.

2000 “La Galigo, Odissei, Trah Buendia” dalam “1000 Tahun Nusantara”. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Baudrillard, Jean.

2000 “Berahi”. Yogyakarta: Bentang Budaya.

Camus, Albert

1999 “Mite Sisifus”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gaarder, Jostein

1996 “Dinia Sophie”. Bandung: Mizan.

Geertz, Clifford

1983 “Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa”. Jakarta: Pustaka Jaya.

Kurniawan.

2001 “Semiologi Roland Barthes”. Magelang: Indonesia Tera.

Mulyana, Deddy

2001 “Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar”. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mc Clod, Scoot

2001 “Understanding Comics”. Jakarta: PT. Gramedia.

Peursen, C.A. Van

1985 “Strategi Kebudayaan”. Yogyakarta: Kanisius.

Sanderson, Stephen K.

1993 “Sosiologi Makro” Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Press.

Sindhunata

1983 “Dilema Usaha Manusia Rasional”. Jakarta: PT. Gramedia

Smith, Linda dan Raeper, William.

2000 “Ide-ide, Filsafat dan Agama, Dulu dan Sekarang”. Yogyakarta: Kanisius.

Sunardi, ST

1999 “Nietzsche”. Yogyakarta: LKiS.

Supartono, Alexander.

2000 “Lekra vs Menikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-1965”. Jakarta: STF Driyarkara (Skripsi, tidak dipublikasikan)

Suryolaksono, Iwan dan Adlin, Alfathri.

“Dari Mitos Oedipus hingga Dongeng Sangkuriang”. Makalah Konferensi International Budaya Sunda I (Tanpa tahun)

Tedjoworo, H.

2001 “Imaji dan Imajinasi”. Yogyakarta: Kanisius

Media dan Sumber Lain

Kompas, Edisi 6 Juni 2003, hlm. 42.

<http://www/FilsafatKita.com>

<http://www/kunci.or.id/>

KONGLOMERASI MEDIA DI INDONESIA: Berkah atau Musibah Bagi Demokrasi?

Oleh: Tri Agus Susanto

Pers Indonesia berubah secara drastis setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Menteri Penerangan era Presiden B.J. Habibie, Mohammad Yunus Yosfiah, mencabut Permenpen No.01/Per/Menpen/1984 tentang SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) untuk media cetak. Era itu dimulai tak ada lagi organisasi tunggal untuk organisasi wartawan yang selama ini mengekang awak media. Undang Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengakhiri campur tangan negara dalam bidang pers seperti yang biasa terjadi pada masa Orde Baru. Selain itu, muncul Undang Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Permenpen No.01/Per/Menpen/1984, lalu diganti SK No.132/1998, yang membolehkan siapa pun menerbitkan media cetak hanya dengan mengisi formulir permohonan, akte pendirian perusahaan, dan susunan pengasuh penerbitan pers. Ini merupakan awal *booming* perusahaan pers, siapa yang memiliki modal berhak mendirikan perusahaan. Data menunjukkan setelah 1998, surat

kabar di Indonesia kian berwatak industri. Pada 1997, jumlah media yang memiliki SIUPP sebanyak 289. Dua tahun kemudian, 1999, jumlahnya melejit menjadi 1.687 media. Seleksi alam, menjadikan jumlah itu tiap tahun mengalami penyusutan, dan menjadi 1.076 di tahun 2010. Namun, tahun 2011 jumlah media cetak menjadi sekitar 1.000 judul dengan total tiras 25 juta eksemplar. Media cetak yang memiliki tiras paling banyak adalah surat kabar harian, disusul berturut-turut majalah, tabloid, dan surat kabar minggu.

Seiring dengan kian berkembangnya industri media, maka muncul kecenderungan konglomerasi media. Kecenderungan media berhimpun dalam satu korporasi – sepuluh tahun terakhir ini - makin menguat. Berhimpunnya media-media, melalui proses akuisi atau *merger*, ini merupakan perkembangan tak terelakkan, yang biasanya ditempuh untuk memperbesar profit dan memperkecil biaya. Itulah wajah media di Indonesia mutakhir. Pertanyaan penting kemudian adalah, apakah konglomerasi media di Indonesia menguntungkan bagi demokrasi atau justru sebaliknya?

Konglomerasi media tampaknya merupakan fenomena global. Di Amerika Serikat dan negara maju lainnya, cenderung memusatnya kepemilikan media ini menimbulkan kekhawatiran dalam soal keberagaman informasi di media. Selain itu, kepemilikan yang terpusat juga membuat media lebih rentan diintervensi oleh kepentingan politik. Apalagi jika pemilik media juga merupakan politisi, atau setidaknya punya afiliasi dengan partai politik.

Ziauddin Sardar (2008) mencatat konglomerasi media telah meluas dengan pesat sehingga hanya segelintir perusahaan yang sekarang mengendalikan kebanyakan produk media. Empat kantor berita Barat menyuplai 90% pers, radio, dan televisi di dunia: Associated Press (AP), United Press International (UPI), Reuters, dan Agence France Presse (AFP), Lebih dari duapertiga korespondennya berbasis

di Barat. Berita-berita televisi global disuplai oleh CNN, CNBC, dan BBC World Service. Selama Perang Teluk 1991, baik Bush maupun Saddam Husein bergantung pada CNN untuk mendapatkan berita. Lebih dari separuh dari seluruh program televisi Asia diimpor dari Barat. Musik rekaman secara total dikendalikan oleh lima perusahaan : Polygram, Time Warner, Sony, EMI dan Bertelsman. Produk film global didominasi oleh studio-studio yang dimiliki oleh Disney, Time Warner, Viacom, Universal, Sony, Polygram, MGM dan News Corporation.

Robert Mc Chesney (1997) mengemukakan tiga prasyarat penting yang mendasari pembentukan sistem sosial politik masyarakat demokratis : 1) Tiadanya ketimpangan sosial dalam masyarakat, 2) Terbentuknya kesadaran tentang keutamaan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan 3) Sistem komunikasi politik yang efektif.

Menurut Chesney penguasaan pribadi terhadap sistem media dan komunikasi bukanlah suatu praktek yang netral atau menguntungkan setiap pihak. Indikasinya, pertama, dalam kehidupan politik, komersialisme dalam media dan komunikasi berpengaruh besar dalam mendorong terjadinya proses depolitisasi masyarakat sipil Amerika Serikat. Kedua, ia menciptakan suatu budaya politik yang lemah, penuh apatisme dan egoisme yang sangat kental di antara warga negaranya. Singkatnya, sistem industri media di Amerika Serikat sama sekali menghancurkan tiga kriteria yang sebelumnya ditetapkan sebagai suatu prasyarat masyarakat demokratis.

Pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Bahkan pada perubahan politik dari era Orde Baru ke era sekarang (reformasi), media massa memainkan peran yang sangat penting. Eforia kebebasan pers juga sempat dinikmati media. Namun perubahan begitu cepat. Agus Sudibyo (2008:3), anggota Dewan Pers menggambarkan kondisi

media saat ini dengan sebuah kalimat, “Sejenak Terang, Terbitlah Gelap”. Apa yang terjadi pada media kita, terutama media penyiaran, yang dulu merupakan sebuah kekuatan mendukung demokratisasi kini berubah menjadi sebuah ancaman bagi demokrasi. Media massa yang mempunyai irisan kuat dengan ekonomi ada potensi untuk mengorbankan aspek publik dalam perilakunya. Lebih parah lagi jika pemilik modal perusahaan media berkolaborasi dengan negara. Yang terjadi kemudian adalah bandul demokratisasi kembali bergerak ke arah sebaliknya.

R. Kristiawan (2011: 45) mencatat setelah Orde Baru, muncul pola baru berupa refeodalisasi ruang publik yang dilakukan negara maupun pasar. Produk-produk hukum pro-keterbukaan sempat muncul pada awal pemerintahan reformasi seperti UU Pers No. 40/1999 dan UU Penyiaran No. 32/2002. Namun di kemudian hari ada ‘serangan balik’ melalui sejumlah produk hukum seperti UU ITE No.11/2008 dan UU Perfilman No.33/2009 yang kembali bersifat anti-keterbukaan.

Perselingkuhan antara pengusaha dengan penguasa (pemerintah) terjadi dengan cara pengusaha media menggunakan tangan pemerintah untuk menerbitkan pelbagai kebijakan pro-pasar. Perselingkuhan ini berbahaya karena publik akan kehilangan media yang independen. Media yang seharusnya bersama publik memperjuangkan demokratisasi, bisa jadi malah akan menjadi musuh demokrasi.

Associate Professor dari Northeastern University Jeffrey A Winters (2011) penulis buku *Oligarki*, tahun lalu meluncurkan bukunya di Yogyakarta. Menurut Jeffrey Winters oligarki terkait dengan politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan. Orang-orang kaya itu terlibat dalam mempengaruhi kebijakan, termasuk dalam hal ini tentunya membangun opini publik, untuk mempertahankan kekayaannya dari ‘gangguan’ masyarakat dan negara.

Pada saat Orde Baru berkuasa, politik oligarki alias pertahanan kekayaan para pengusaha dijamin oleh pemerintah. Soeharto menggunakan kekuatan represif untuk memukul gerakan masyarakat bawah yang hak-haknya dilanggar oleh operasi bisnis pengusaha. Setiap ada masyarakat yang mencoba melakukan perlawanan segera dihadapi dengan cara-cara kekerasan baik fisik maupun psikologis. Kini pelindung itu tak ada lagi, karena itu mereka menguasai media untuk melindungi diri.

Menurut Jeffrey Winters (Kompas, 26 Juni 2013), peranan media massa di Indonesia dapat berpotensi menjadi pilar demokrasi. Akan tetapi media massa saat ini masih cenderung menjadi sarana oligarki. “Jangan berharap para oligarki akan membatasi diri mereka sendiri, Namun hanya masyarakat sipil yang mampu membuat perubahan,” katanya.

Peta Konglomerasi Media

Riset Yanuar Nugroho, Ph.D (2012) menunjukkan di Indonesia kepemilikan stasiun televisi yang disiarkan dari Jakarta dikuasai oleh 12 kelompok usaha. Pengajar di University of Manchester Inggris ini dalam presentasi *pre-launching* hasil risetnya di kampus STPMD ‘APMD’ pada kegiatan Jagongan Media Rakyat (JMR) Februari 2012 mengatakan, perubahan media dari di bawah kekuasaan otoriter orde baru ke konglomerasi media saat ini, ibarat keluar dari mulut macan masuk mulut buaya.

Peta Kepemilikan Media di Indonesia

| No | Kelompok Media | Televisi | Cetak | Radio | Online |
|----|-------------------------|--|---|---|-------------------------------------|
| 1 | MNC Group | RCTI, Global TV, MNC TV, SUN TV, Indovision, Top TV, OK Vision | Harian Seputar Indonesia, Majalah Trust, Tabloid Genie, Tabloid Mom & Kiddie, Majalah High End | Sindo Radio, Global Radio, Radio Dangdut, V Radio dan lain-lain | Okezone.com |
| 2 | Trans Corp | Trans TV dan Trans 7 | | | Detik.com, MyTrans.com, Agracom.com |
| 3 | Bakrie & Brothers Group | TV-ONE, ANTV | | | Vivanews.Com |
| 4 | Surya Citra Media (SCM) | SCTV, Indosiar, O Channel, PT Multimedia (TV Berbayar) | Tablois Gaul, Elshinta, K6ort, Story, Mama Mia! | | Liputan6.com |
| 5 | Media Group | Metro TV | Harian Media Indonesia, Lampung Pos, Borneo News | | Media Indonesia.com |
| 6 | Kompas Group | Kompas TV | Harian Kompas, Jaringan Tribun News, Warta Kota, Surya, National Geographic, Intisari, Bobo, Hai, Kontan, Bola, dll | Sonora, Motion Radio | Kompas.com |

| | | | | | |
|----|-------------------------|---|---|--|----------------|
| 7 | Jawa Pos Group | JTV, Jawa Pos Multimedia Corporation (televisi berjaringan) | Harian Jawa Pos, Radar, Rakyat Merdeka, Lampu Hijau, Pos Metro, Bolliwood, Majalah Liberty, dll | | Jawapos.com |
| 8 | Kelompok Media Bali Pos | Bali TV | Harian Bali Post, Bisnis Bali, Denpasar Post, Suara NTB, Bisnis Jakarta, Tabloid Tokoh, Wiyata Mandala, Lintang, Mingguan Bali, Travel News | Bali Radio, Suara Denpasar, Radio Nasional Denpasar, Radio Televisi Denpasar, Perusahaan Siaran Denpasar | Balopos.co.id |
| 9 | Tempo Group | Tempo TV | Majaah Tempo, Koran Tempo, majalah U Magazine dan Travelounge | | Tempo.co |
| 10 | Berita Satu Group | BeritaSatu TV, First Media | Harian Jakarta Globe, Investor Daily, Suara Pembaruan, The Straits Time, majalah Investor, Globe Asia, The Peak, Campus Asia, Student Globe, Kemang Buzz, Campus Life | | BeritaSatu.com |

Riset Yanuar Nugroho (2012) mencatat dua belas kelompok media besar mengendalikan hampir semua kanal media di Indonesia, termasuk di dalamnya penyiaran, media cetak dan media online. Mereka adalah MNC Group, Kelompok Kompas Gramedia, Elang Mahkota Teknologi, Visi Media Asia, Grup Jawa Pos, Mahaka Media, CT Group, BeritaSatu Media Holdings, Grup Media, MRA Media, Femina Group dan Tempo Inti Media.

Grup MNC memiliki tiga kanal televisi *free-to-air* – jumlah terbanyak yang dimiliki oleh grup media – juga 20 jaringan televisi lokal dan 22 jaringan radio di bawah anak perusahaan mereka, Sindo Radio. Grup Jawa Pos memiliki 171 perusahaan media cetak, termasuk di dalamnya Radar Grup. KOMPAS, surat kabar paling berpengaruh di Indonesia, telah mengekspansi jaringannya dengan mendirikan penyedia konten yaitu KompasTV, di samping 12 penyiaran radio di bawah anak perusahaan mereka Radio Sonora, dan 89 perusahaan media cetak lainnya. Visi Media Asia telah berkembang menjadi kelompok media yang kuat dengan dua saluran televisi teresterial (ANTV dan tvOne) serta media *online* yang berkembang dengan pesat vivanews.com. Sebuah perusahaan media di bawah Grup Lippo yakni Berita Satu Media Holding, telah mendirikan Internet Protocol Television (IPTV) BeritaSatuTV, kanal media online beritasatu.com dan juga memiliki sejumlah surat kabar dan majalah.

Nugroho juga mencatat, pemusatan di industri media terjadi sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan dari kepentingan modal yang mendorong perkembangan industri media di Indonesia. Oligopoli media yang terjadi saat ini membahayakan hak warga negara atas informasi karena industri media sudah berorientasi keuntungan dan perusahaan-perusahaan media telah mewakili gambaran bisnis yang menguntungkan yang dapat dibentuk oleh

kepentingan pemilik dan dengan demikian, bisnis media menjadi sangat memberi manfaat bagi mereka yang mencari kekuasaan. Hal ini terutama menjadi kasus pada sejumlah pemilik media yang juga berafiliasi dengan dunia politik. Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar yang juga pemilik Viva Group dan Surya Paloh, pendiri partai politik NasDem yang juga pemilik Media Group, adalah dua contoh nyata atas tren ini. Ada persepsi umum yang semakin berkembang bahwa kepentingan para pemilik media ini telah membahayakan hak warga negara terhadap media, karena mereka menggunakan media sebagai alat kampanye politik untuk mempengaruhi opini publik. Pendek kata, media telah menjadi sebuah mekanisme di mana para pebisnis dan politisi menyampaikan kepentingan mereka dan pada saat yang sama juga mengambil profit dari bisnisnya.

Kekhawatiran mengenai banyaknya pemilik media massa yang terjun ke dalam politik praktis juga dirasakan mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Arif Wibowo (Kompas, 2 Juli 2013). Pemilik media massa terjun ke dalam politik praktis tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi merusak demokrasi karena memperkuat oligarki politik. Oligarki akan semakin kuat karena ada relasi kuasa politik, modal, dan media massa. Kondisi itu bisa merusak perkembangan demokrasi yang sehat, terutama dalam pelaksanaan pemilu, apalagi jika media massa berlaku tidak adil dalam melakukan sosialisasi politik.

Sebenarnya siapakah yang diuntungkan dengan adanya konglomerasi media. Apakah kita mendapatkan keberagaman isi media dalam konglomerasi media? Eko Maryadi, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dalam seminar “Peranan Media Televisi Mencerdaskan Pemilih dalam Pemilu 2014” (Kompas, 27 Juni 2013) mengatakan, bisnis media di Indonesia terpolarisasi pada

sepuluh pengusaha media besar. Dari jumlah tersebut, yang patut dipersoalkan adalah bahwa separuh terafiliasi pada partai politik tertentu. “Fungsi media yang seharusnya menjadi jembatan untuk masyarakat luas dipertanyakan independensinya,” kata Eko Maryadi.

Sebelumnya, AJI dalam keterangan pers pada peringatan Hari Kebebasan Pers se-Dunia, 3 Mei 2012, menyatakan konglomerasi media berdampak langsung pada munculnya problem ketenagakerjaan di industri media. Problem-problem itu antara lain; Efisiensi tenaga kerja yang berbuntut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Meluasnya *multiplatform* (satu orang bekerja untuk beberapa jenis media) membuat beban kerja bertambah; Lahirnya hubungan tenaga yang merugikan, seperti sistem kontrak, *outsourcing* dll; dan Kepemilikan media menjadi terpusat pada beberapa group dan ini menyebabkan pemberitaan tidak beragam dan berpotensi tidak bermutu.

Hasil survey AJI, upah jurnalis menunjukkan masih banyak jurnalis di Jakarta yang memiliki penghasilan yang tidak layak, apabila diukur dari standar upah layak AJI tahun yang lalu sebesar Rp.5.2 juta perbulan. Selain masalah kesejahteraan dan kebebasan pers yang menjadi tuntutan, AJI juga menuntut adanya keadilan bagi sejumlah jurnalis yang diwarnai oleh pemberangusan serikat pekerja di perusahaan media. Hal ini tercermin dari kasus Luviana dan pemecatan 13 orang anggota dan pengurus Serikat Pekerja Indonesia Finance Today (IFT) yang diadvokasi oleh AJI Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers sejak awal tahun 2012.

Konglomerasi media dikhawatirkan melahirkan dampak cukup besar pada aspek ketenagakerjaan. Kebutuhan untuk memperbesar profit dan menurunkan biaya, otomatis membawa implikasi langsung terhadap nasib, serta kesejahteraan pekerjanya. Ini bisa dilihat dari praktik pengurangan karyawan, atau pemilihan model

hubungan ketenagakerjaan yang kurang berpihak kepada pekerja, yang semuanya bermuara pada orientasi peningkatan profit dan pemangkasan biaya.

Konglomerasi media tentu tidak sehat dalam iklim demokrasi dan politik bangsa ini mengingat pengaruh media yang begitu kuat terhadap khalayak. Mengacu pada Jurgen Habermas (2008) media massa sesungguhnya adalah sebuah *public sphere* yang semestinya dijaga dari berbagai pengaruh dan kepentingan-kepentingan. Dalam artian media selayaknya menjadi “*The Marketplaces Of Ideas*” tempat penawaran berbagai gagasan sebagaimana setiap konsep pasar, di mana hanya ide terbaik sajalah yang pantas dijual dan ditawarkan.

Dalam perspektif teori kritis, konglomerasi media – melalui jaringan media massa - berpotensi menyebarkan ideologi dominan. Ideologi dominan biasanya disebarkan oleh rezim yang berkuasa dalam rangka mengekalkan kekuasaannya. Kelompok dominan melalui media cenderung menyuarakan kepentingannya dan berusaha agar kelas lain turut serta berpartisipasi dengan sukarela, atau tanpa mereka sadari dan itulah yang disebut sebagai “hegemoni”.

Stuart Hall berpendapat media massa cenderung mengukuhkan ideologi dominan untuk menancapkan kuku kekuasaannya melalui hegemoni. Melalui media massa pula ideologi dominan menyediakan *frame work* bagi berkembangnya budaya massa. Dengan menggunakan media massa pula kelompok dominan terus-menerus menggerogoti, melemahkan dan meniadakan potensi tanding dari pihak-pihak yang dikuasainya.

Namun, pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Profesor Tjipta Lesmana mengatakan kepemilikan silang sejumlah media tidak harus selalu dinilai negatif. Konglomerasi media merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari juga terjadi di

banyak negara maju. Pernyataan Tjipta Lesmana tersebut disampaikan saat ia memberi kesaksian sebagai ahli dalam sidang uji materi pasal 18 ayat 1 dan pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di Mahkamah Konstitusi, April 2012.

Tjipta Lesmana berpendapat konglomerasi atau *cross ownership* tidak dapat dibendung. Ini sudah menjadi fenomena global. Teori sistem mengatakan media memang tidak bisa berdiri sendiri. Di Amerika Serikat terdapat puluhan ribu media massa cetak maupun elektronik. Media-media tersebut dimiliki secara silang hanya oleh 10 perusahaan besar. Itu fakta yang terjadi. Pemerintah Amerika Serikat awalnya bersikap keras terhadap persoalan ini, tapi akhirnya tidak bisa seperti itu,

Sikap negatif melihat konglomerasi media muncul dikarenakan rasa ketakutan-ketakutan akan kepentingan para pemodal. Ketakutan intervensi pemilik modal pada media massa. Sejauh ini, menurut Tjipta Lesmana, pemilik modal tidak bisa ikut campur pada konten-konten media. Otonomi sepenuhnya tetap dimiliki oleh *newsroom*.

Kekhawatiran publik jelas ada alasannya. Salah satu alasan adalah kolaborasi penguasa media dengan partai politik. Surya Paloh, Hary Tanoesudibyo, dan Aburizal Bakrie sudah membuktikan hal itu. Mereka pemilik jaringan media massa sekaligus tokoh partai politik. Publik dengan jelas bisa mengamati iklan dan pemberitaan yang berlebihan terhadap Surya Paloh sebagai Ketua Partai Nasdem di Metro TV. Begitu juga Aburizal Bakrie sebagai Ketua Partai Golkar di TV-One dan ANTV, dan Harry Tanoesudibyo sebagai tokoh Partai Hanura di RCTI, Global TV dan MNC TV.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mampu berbuat banyak terhadap mereka yang telah memulai kampanye jauh-jauh hari atau mencuri start

kampanye. Sudah tentu, informasi yang lahir dari media tersebut cenderung bias. Pembodohan publik bisa terjadi melalui media yang sudah tidak lagi berpihak pada warga lantaran harus melindungi kepentingan politik pemilik atau pengelolanya. Apa pentingnya bagi publik berita Surya Paloh di Metro TV saat melantik pengurus Partai Nasdem di suatu daerah. Apa manfaatnya bagi pemirsa disodori berita di tiga stasiun televisi milik Harry Tanoesudibyo ketika membagi-bagi sembako ke masyarakat kurang mampu. Juga tentu saja publik tak membutuhkan berita yang disiarkan secara langsung mengenai kegiatan Aburizal Bakrie di partainya.

KPU dan KPI menemui kesulitan membuat batasan-batasan untuk isi iklan kampanye parpol karena hal itu berkaitan dengan kreativitas rancangan suatu iklan. Namun, Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dapat digunakan untuk mengatur hal-hal apa saja yang patut dan tidak patut ditampilkan dalam iklan kampanye parpol. KPU dan KPI bisa membatasi partai politik dan tokohnya untuk tidak 'berbohong' kepada publik melalui media. Misalnya dengan mengatakan kandidat partai itu sudah bekerja banyak untuk republik ini dan akan bekerja lebih banyak lagi bila dipilih. Kebohongan seperti ini harus dicegah karena belum ada pembuktian.

Pemilihan Umum 2014 sudah di depan mata, semakin merebak pemusatan kepemilikan media, terutama media televisi, sehingga mengancam independensi ruang redaksi. Kolaborasi penguasa partai politik dan penguasa media massa bakal menempatkan posisi pers Indonesia menjadi lebih rentan terhadap berbagai intervensi politik kekuasaan terhadap jurnalis. Tentu ini sangat mengancam fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi menjalankan kontrol sosial politik terhadap jalannya kekuasaan negara dalam kehidupan sehari-hari.

Melawan Konglomerasi Media

Jika media dikuasai pengusaha sekaligus penguasa (partai politik), media kehilangan esensi dan akal sehatnya untuk melakukan kontrol sosial. Apalagi harus menjadi pilar demokrasi, pers yang telah terkooptasi pemilik modal, ia justru menjadi musuh demokrasi, bukan pilar demokrasi. Sesuatu yang sangat naif jika media yang dimiliki politisi masih mengatakan bisa independen dan bebas dari intervensi pemilik.

Masyarakat sebagai konsumen media harus melawan konglomerasi media karena mengancam keragaman konten media, menyebabkan media kian tak independen, dan yang lebih parah pemilik modal industri media yang berselingkuh dengan pemerintah akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Bagaimana masyarakat melawan konglomerat? Tentu hal ini bisa dilakukan. Masyarakat termasuk di dalamnya kelompok masyarakat sipil (civil society) dan perguruan tinggi, bisa berperan banyak. Kampanye publik mengenai pentingnya keterbukaan informasi dan kebebasan pers, perlu digalakkan. Sinergi antara organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi dengan lembaga negara semacam KPI dan KPU perlu dilakukan. Mengadvokasi kasus-kasus yang diakibatkan oleh keserakahan pengusaha media merupakan satu hal yang harus dilakukan. Serta tak bosan-bosannya melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika muncul pasal dalam undang undang yang menghambat keterbukaan informasi dan kebebasan pers. Sebagai bentuk perlawanan yang sederhana, perlu melakukan upaya bagaimana membesarkan peran lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas. Khusus untuk akademisi dari perguruan tinggi, cukup sudah kiranya berulang kali menjadi pendukung pembuatan undang undang yang pada akhirnya

menghambat keterbukaan informasi dan kebebasan pers. Akademisi harus mengakhiri menjadi saksi ahli yang membela pengusaha penggelap pajak melawan media independen.

Media penyiaran adalah arena pertarungan dalam perebutan makna antara pihak-pihak yang ingin “berkuasa”. Dalam pertarungan tersebut muncul dua kutub kepentingan, massa vis-a-vis pemilik modal. Media penyiaran dalam konteks pertarungan tersebut selayaknya berpihak pada massa dan berupaya mendorong manusia untuk berkesadaran kritis. Keberpihakan seperti ini mutlak dilakukan dalam upaya melawan dominasi sistem hegemonik. Antonio Gramsci lewat teorinya menyarankan kepada massa untuk membangun *counter* wacana atau yang lazim disebut wacana tandingan (*counter discourses*). Wacana tandingan ini untuk mengimbangi dominasi dan hegemoni yang dikonstruksi oleh para kaum kapitalis.

Dalam dunia penyiaran, gerakan ‘perlawanan’ ini sesungguhnya diemban pada lembaga penyiaran komunitas, yang berbasis kewargaan. Mengapa lembaga penyiaran komunitas? Hal ini karena melihat basis filosofisnya, lembaga penyiaran komunitas amat berbeda dengan lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang terbentuk dari inisiatif warga, dan bertujuan memenuhi kebutuhan warga akan informasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Lembaga penyiaran ini berpijak pada penguatan kesadaran kritis warga terhadap segala hal yang berpotensi eksploitatif dan dominatif.

Untuk menghambat konglomerasi media makin merajalela, perlu adanya perubahan yang menyeluruh dalam tata sistem perekonomian. Ada tiga langkah melawan konglomerasi media. Pertama mendesak pemerintah harus konsisten melaksanakan UU Penyiaran dengan tegas memberikan sanksi kepada media penyiaran yang melanggar, misalnya kepemilikan lebih dari satu di

sebuah provinsi, mempercepat sistem penyiaran berjaringan, dan memperkuat peran KPI. Kedua, masyarakat harus mengimbangi industri media, terutama penyiaran dengan memperkuat lembaga penyiaran publik (TVRI dan RRI) dan lembaga penyiaran komunitas. Ketiga, masyarakat kampus hendaknya berdiri paling depan mengawal keterbukaan informasi dan kebebasan pers agar jangan kembali ke era orde baru. Akademisi dan mahasiswa tentu tak ingin terjadi perselingkuhan antara konglomerat media dengan pemerintah. Karena perselingkuhan itu bisa berakibat seperti yang dikatakan Yanuar Nugroho: media dari di bawah kekuasaan otoriter orde baru ke konglomerasi media saat ini, ibarat keluar dari mulut macan masuk mulut buaya.

Daftar Pustaka:

1. Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, Shita Laksmi, Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia, Ford Foundation, Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), dan HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, Maret 2012
2. Siregar, Amir Effendi dkk, Dominasi TV Swasta (Nasional) Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan, Pro2media dan Tifa, 2012
3. Kristiawan, R, Jerat Negara dan Pasar dalam Ruang Publik, dalam “Masyarakat Terbuka Indonesia, Pesona atau Persoalan?” LP3ES, Prisma Vol 30, 2011
4. Sudibyo, Agus dan Nezar Patria, Ditempa Pertarungan Modal: Industri Pertelevisian di Indonesia Pasca-Otoritarianisme, dalam “Perselingkuhan Bisnis & Politik, Kapitalisme Indonesia Pasca-Otoritariannisme” LP3ES, Prisma Vol 32, 2013

5. Habermas, Jurgan, Ruang Publik, Kreasi Wacana, 2008
6. Winters, Jeffrey A, Oligarki, Gramedia Pustaka Utama, 2011
7. Storey, John, Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop, Jalasutra, 2007
8. Sudibyo, Agus, Sejenak Terang, Terbitlah Gelap, dalam Keterbukaan Informasi & Kebebasan Pers, Dewan Pers, 2008
9. Sardar, Ziauddin, Membongkar Kuasa Media, Resist Book, 2008.
10. Kompas, 26 Juni 2013
11. -----, 27 Juni 2013

TELEVISI, KECEMASAN PUBLIK, DAN KPI

Oleh Fadjarini Sulistyowati

Perkembangan televisi di Indonesia cukup pesat. Satu-satunya media massa yang memiliki akses terbesar adalah televisi sehingga akhirnya televisi adalah satu-satunya bentuk komunikasi publik yang paling kuat serta tempat utama bagi negosiasi sosial perihal gagasan-gagasan, nilai-nilai dan gaya hidup (Michael Skovmand dan Kim Schroder dalam Braemer Burton, 2007:101). Pendapat ini merupakan pendukung dari kecemasan masyarakat kita (baca: kelompok terdidik) terhadap pengaruh negatif televisi semakin memuncak. Bagi masyarakat Indonesia, televisi merupakan media massa yang paling populer. Di setiap sudut rumah, pasti terpajang televisi. Televisi menjadi bagi dari keseharian masyarakat kita. Masyarakat tidak bisa melepaskan diri dari media hiburan ini.

Tayangan televisi pun semakin variatif. Bukan hanya sajian hiburan semacam tayangan sinetron, panggung musik, reality show dan lain-lain. Namun, terkadang berbagai tayangan sinetron, infotainment, *reality show* yang terkadang lebih berkesan membujuk masyarakat untuk konsumtif dibanding tayangan mencerdaskan. Bahkan saat ini dengan semakin meningkatnya sajian jurnalisme di televisi, pemberitaan yang tidak *cover both side* maka akan memberikan dampak terhadap penggiringan opini masyarakat yang

mungkin tidak benar. Misalnya keberadaan pemilik televisi yang juga mengawal partai politik tertentu akan cenderung mengarahkan pemberitaan ke arah opini yang diinginkan partai politiknya. Hal ini tentunya akan menyesatkan publik.

Kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik mengakibatkan media tidak menjadi ruang publik yang independen. Hal ini memunculkan konsep *hiperealitas media*, ketika media dikendalikan oleh dua kepentingan yakni ekonomi dan politik maka objektivitas, kebenaran, keadilan dan makna sebagai kepentingan publik dikalahkan oleh subjektivitas, kesemuan dan permainan bahasa, (Yasraf A. Pilliang, 2005: 215)

Publik tidaklah subjek pasif. Boleh jadi, mereka larut menikmati sajian televisi hanya saja khalayak juga memiliki kecerdasan untuk menganggap realitas televisi bukanlah realitas sesungguhnya. Karenanya, tayangan televisi sebatas sekadar hiburan untuk melupakan kepenatan hidup tanpa memosisikannya sebagai panutan nilai tentunya tidak benar. Saat ini masyarakat semakin kritis walaupun penonton televisi kita sangatlah heterogen. Baik dari latar belakang pendidikan maupun tingkat pendapatan ekonomi yang sangat kontras dengan masyarakat Barat yang homogen. Masyarakat memang tidak boleh tinggal diam. Upaya untuk melakukan protes dan kritikan harus selalu dimunculkan. Contoh salah satu protes yang dilakukan komunitas dalam masyarakat yakni komunitas yang menamakan dirinya Masyarakat TV Sehat Indonesia mengirim surat ke KPI untuk memprotes sinetron religious seperti *Tukang Bubur Naik Haji* (RCTI), *Ustad Foto Copy* (SCTV), dan *Islam KTP* (SCTV), semuanya menggunakan judul dengan terminologi Islami, tapi isi dan jalan ceritanya jauh dari perilaku Islami. Menurut mereka, karakter Ustad dan Haji yang seharusnya merupakan tokoh panutan di tengah-tengah masyarakat melakukan tindakan di luar kepatutan, suka mencela, iri, dengki, dan sama sekali tidak ada pesan Islam di dalamnya. Tayangan tersebut telah memunculkan

persepsi buruk tentang tokoh panutan dalam agama Islam, dan jelas hal ini sangat meresahkan masyarakat (www.KPI.go.id).

Beberapa tayangan sinetron televisi memang berlebihan, ataukah sajian ini sebagai upaya “menjual” hiburan yang terkesan tidak mendidik. Tayangan sinetron yang menampilkan keragaman pemain dari berbagai latar budaya Indonesia semakin banyak namun ternyata tidak semua mendidik. Salah satu sinetron misalnya menampilkan pemain dari daerah Papua dengan kesan berlebihan seolah mereka adalah masyarakat dari budaya primitif dengan menggunakan atribut kedaerahan yang menonjolkan kekonyolannya. Sangatlah ironis, bila tayangan ini menjadikan budaya daerah sebagai bahan lawakan. Kita tentunya berharap tayangan hiburan dapat mewakili berbagai budaya di Indonesia namun bukan meminggirkan budaya yang lain.

Akhirnya, gerakan untuk mengawasi siaran televisi mulai gencar dilakukan karena sajian televisi saat ini seolah memang menjadi monster yang mengkhawatirkan. Masyarakat mulai cemas dengan berbagai tayangan kebanyakan sinetron yang tidak mendidik, film yang permisif terhadap kekerasan, dan tayangan-tayangan lain yang mengabaikan moralitas. Iklan-iklan komersial yang muncul tanpa kontrol dan lain sebagainya. Hal ini jelas positif dan dapat menjadi indikasi bahwa masyarakat mulai cerdas dalam mengapresiasi tayangan televisi. Kekhawatiran khalayak sebagai konsumen televisi akan mendorong stasiun televisi untuk berhati-hati dalam menyajikan siaran.

Saat ini, media massa memang mengalami perubahan bahkan ada yang mengatakan dominasi media telah bergeser dari otoritarianisme politik ke otoritarianisme kapital, yang awalnya memperjuangkan kebebasan berekspresi dan kebebasan media justru akhirnya memosisikan masyarakat sipil sekadar konsumen belaka tanpa hak-hak kewarganegaraan, ((PKMBP, 2013: 10). Indikasi ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Yanuar Nugroho (2012)

dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) dan HIVOS.

Hasil penelitian itu memetakan 12 media besar yang menguasai hampir semua kanal media di Tanah Air. Para penguasa media tersebut adalah Grup MNC, Kompas Gramedia, Jawa Pos, Mahaka Media, Elang Mahkota Teknologi, CT Corp, Visi Media Asia, MRA Media, Femina, Tempo Inti Media, dan Berita Satu Media Holding. Media yang dikelola sebagai bisnis yang mewakili kepentingan pemilik dan kekuasaan yang dimilikinya. Apalagi dalam era demokrasi saat ini media massa merupakan ruang strategis menguasai massa sehingga tidaklah heran bila media kemudian menjadi alat bagi pemiliknya untuk berkampanye seperti yang dilakukan oleh Surya Paloh dengan Metro TV, Aburizal Bakrie dengan TV One dan Hari Tanoe melalui MNC Group.

Berkembangnya Media Literasi

Salah satu pendorong adanya gerakan dan protes dari masyarakat terhadap media adalah munculnya gerakan-gerakan media literasi oleh berbagai komunitas dalam masyarakat. Literasi media merupakan benteng bagi khalayak agar kritis terhadap isi media, literasi media menurut Potter adalah seperangkat perspektif yang kita gunakan secara aktif saat mengakses media massa untuk menginterpretasikan pesan yang kita hadapi, (dalam PKMBP, 2013: 15).

Sehingga gerakan literasi media merupakan upaya yang dilakukan kelompok masyarakat yang peduli terhadap bahaya media untuk mencoba mendorong sikap kritis masyarakat sekaligus melatih untuk menyaring berbagai tayangan sesuai kebutuhan informasi mereka. Beberapa gerakan ini misalnya yang dilakukan oleh Yayasan Sahabat Cahaya Jakarta, yang merupakan gerakan dari sekelompok organisasi pemuda Masjid Al Azhar Jakarta. Beberapa kegiatan mereka diantaranya melakukan kampanye identifikasi masalah media

dan sehat mengonsumsi media melalui program untuk orang tua murid di Sahabat Kecil *Preschool* dan gerakan mendongeng untuk anak , (PKMBB, 2013: 45-50).

Gerakan literasi media lain yang dilakukan oleh Masyarakat Peduli Media (MPM) Yogyakarta, beberapa kegiatan mereka diantaranya melakukan gerakan literasi media dalam bentuk sosialisasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan aksi-aksi semacam peringatan “Sehari Tanpa TV”. Beberapa gerakan media literasi banyak bermunculan baik yang didorong masyarakat kampus atau kelompok-kelompok keagamaan.

Namun memang gaung dari gerakan yang didorong literasi media ini masih jauh dibandingkan dengan gencarnya berbagai tayangan televisi. Mendorong masyarakat untuk kritis bahkan melakukan berbagai protes atau boikot terhadap tayangan tertentu yang dianggap tidak mendidik tidaklah mudah apalagi untuk kondisi masyarakat Indonesia. Hal ini karena *pertama*, kesadaran akan hak konsumen belum muncul secara merata. *Kedua*, masyarakat Indonesia adalah masyarakat heterogen sedangkan solidaritas lebih mudah diwujudkan pada masyarakat yang homogen. *Ketiga*, segmentasi acara tidak berakibat pada iklan yang masuk pada acara tersebut. Berbeda dengan televisi di negara-negara maju segmentasi acara mengakibatkan perbedaan terhadap iklan produk sponsor acara tersebut. Sedangkan di negara kita, iklan di televisi kita hampir tidak ada bedanya (tidak tersegmentasi), sehingga sulit bagi masyarakat untuk melakukan pemboikatan terhadap produk yang beriklan pada acara tersebut.

Selain itu, aksi boikot terbukti dalam banyak kasus ternyata bukanlah tindakan populer dalam masyarakat kita. Seringkali aksi boikot disuarakan cukup gencar, tetapi sekaligus ditanggapi dengan sangat tidak memadai. Misalnya kampanye gerakan sehari tanpa TV menjadi tidak berdampak karena media menayangkan isu yang lebih menarik bagi publik. Kampanye berkesinambungan yang disuarakan

berbagai kelompok atau elemen masyarakat terhadap tayangan televisi merupakan upaya yang sudah cukup bagus. Namun, dalam mengatur media pertelevisian yang dianggap memiliki kekuatan besar tentunya bukan hanya dibutuhkan gerakan masyarakat tetapi perlu adanya regulasi dan hukum yang pasti. Dibutuhkan adanya lembaga yang mampu berperan untuk mengerakkan regulasi tersebut. Lembaga Negara yang berwenang untuk mengatur media televisi sebagai media penyiaran sesuai Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002 adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sehingga perlu untuk mempertanyakan bagaimana peran KPI sebagai regulator media penyiaran khususnya televisi di Indonesia saat ini?

Fungsionalisasi Lembaga

Keberadaan KPI sebagai lembaga regulator penyiaran memiliki kendala yang cukup rumit. Komisi yang dibentuk berdasarkan UU No. 32/2002 ini sulit untuk memosisikan dirinya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh sebagai lembaga regulasi bidang penyiaran. Padahal kalau kita cermati UU No. 32/2002, eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxillary state institution*.

Namun, tidak seperti komisi-komisi lainnya semacam Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan dan fungsi yang aplikatif. Sebenarnya KPI dibentuk dengan *setengah hati*, keberadaannya seolah hanya dimunculkan karena amanat UU No. 32/2002 (konsekuensi formal) bukan karena kebutuhan akan lembaga

regulator penyiaran (paradigmatik). Kewenangan KPI lebih banyak dalam pengawasan isi siaran dengan implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Sedangkan kewenangannya menyangkut perizinan (izin siaran) pun menjadi tumpul karena diambil alih pemerintah yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah No. 49, 50, 51, 52 Tahun 2005. Menghadapi kenyataan buruk tersebut KPI melakukan pengajuan hak uji materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi pada 2007, tetapi ditolak.

Seharusnya sebagai KPI dalam menjalankan fungsinya lembaga negara memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi.

Saat ini fungsi yang dilakukan KPI dalam mengawasi program siaran televisi dan radio lebih banyak bergantung pada protes/kritikan yang dilakukan masyarakat terhadap berbagai program siaran. Masyarakat selain melakukan berbagai upaya gerakan dan kampanye untuk memberikan kritik program siaran televisi juga dapat secara langsung protes melalui KPI.

Bahkan KPI kemudian menginisiasi dengan membangun forum untuk membentuk mitra dalam pengawasan media seperti yang dilakukan pada tanggal 21 November 2012 KPI membentuk sebuah forum agar dapat saling berkoordinasi dan menguatkan. Forum tersebut kemudian dinamakan FORMAT LIMAS (Forum Masyarakat Peduli Media Sehat). Forum ini menjadi mitra utama KPI dalam menggerakkan literasi media dan bermitra dengan *stakeholder* penyiaran yang lain untuk pengembangan literasi media di internal organisasi masing-masing dan di daerah.

Upaya KPI untuk membangun aliansi dengan elemen yang ada dalam masyarakat memang cukup menarik. Karena akhirnya fungsi

KPI sebatas pengawasan siaran itu pun harus mengajak partisipasi masyarakat sedangkan untuk melakukan peneguran dan sanksi tanpa adanya dukungan dari masyarakat suara KPI menjadi lemah. Padahal, seharusnya sebagai KPI dalam menjalankan fungsinya lembaga negara memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi.

Namun, memang tanpa adanya kewenangan dalam perijinan KPI sebagai lembaga yang fungsinya dalam regulasi penyiaran menjadi tumpul itulah sebabnya Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring sendiri merasa resah karena sanksi yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap tayangan televisi kerap tidak diperhatikan, (Suara Pembaharuan.com 16 Agustus 2012). Sampai saat ini Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia masih terus memperjuangkan penerbitan lisensi penyiaran berada dalam kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia. Karena selama penerbitan dan pencabutan lisensi siaran dan lisensi frekuensi penyiaran ada di tangan Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti saat ini maka akibatnya, lembaga penyiaran seringkali tidak mengindahkan sanksi yang diberikan oleh KPI.

Tantangan terbesar yang dihadapi KPI adalah memperjuangkan optimalisasi peran mereka dalam perijinan . KPI saat ini berhadapan dengan lembaga penyiaran yang merupakan suatu perusahaan raksasa yang memiliki kekuasaan ekonomi maupun politik. Tanpa adanya perubahan dalam fungsi KPI maka sanksi terhadap media hanya akan diabaikan. Baru-baru ini KPI juga memrotes tayangan “Eyang Subur” dengan menyampaikan surat kepada sebelas stasiun televisi dan mengancam akan memberikan sanksi namun tayangan “Eyang Subur” masih tersaji karena selama program acara ini masih menduduki rating maka mereka memilih tetap disiarkan.

Selama KPI belum memiliki fungsi dalam perijinan maka peran KPI lebih banyak dalam membangun aliansi, mengadakan MOU dengan berbagai instansi dan elemen masyarakat. Hal ini seolah-olah tidak bisa terelakkan oleh KPI agar memiliki kekuatan dalam mengawasi program siaran. Sebetulnya, membangun aliansi bukanlah langkah yang bijak dalam mengatasi kelemahan KPI di hadapan pemilik media siaran. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan materi siaran, KPI tidak perlu melakukan kerja ekstra menjadi bagian dari aliansi masyarakat yang peduli terhadap pengaruh lembaga penyiaran. KPI tetaplah lembaga negara, institusi ini berhak dan berwenang untuk memberi teguran dan sanksi. Jalan yang paling relevan KPI harus terus-menerus melakukan (mendesakkan) fungsionalisasi kelembagaannya kepada pihak-pihak terkait.

Ada beberapa kelemahan dalam tindakan membentuk aliansi, pertama, KPI telah salah dalam memosisikan keberadaannya dalam masyarakat. Gerakan mulia seperti ini lebih tepat bila dilakukan oleh lembaga/elemen masyarakat bukan insititusi yang merupakan lembaga negara. Kedua, fungsi pengawasan adalah tugas KPI, dengan membangun kesepakatan ini KPI membagi tugasnya ke berbagai elemen masyarakat. Akibatnya bila muncul protes masyarakat akan lemahnya pengawasan maka KPI bisa beralih bahwa tugas itu adalah tugas bersama. Ketiga, seringkali kesepakatan yang diformalkan dalam bentuk MoU berhenti menjadi ‘kekuatan di atas kertas’ yang tidak dapat maksimal digunakan dalam praktik. Terbentuknya kesepakatan beraliansi melalui yang dituangkan melalui MoU akan menjadi akhir dari ‘penyelesaian semu’ terhadap tugas pengawasan yang jadi wewenang KPI.

KPI tetap bisa bergerak menunjukkan kekuatan di hadapan media penyiaran sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap media siaran. Misalnya, KPI bisa membuat suatu daftar pelanggaran yang dilakukan media penyiaran

dan menyosialisasikan hasil pengawasan tersebut kepada masyarakat. Sebaliknya KPI dapat menindalanjuti protes masyarakat. Seperti, ketika tayangan Empat Mata (Trans 7 dikenai sanksi skorsing tidak boleh disiarkan selama satu bulan. Sekalipun, habis skorsing acara yang sama tampil dengan kemasan yang identik (tetap vulgar) seakan menafikkan keberadaan KPI.

Memang, KPI secara faktual-yuridis lemah dalam hal pencabutan izin siaran karena wewenang ini diambil alih pemerintah. Namun, dengan membuat daftar (membuat kriteria dan peringkat acara yang buruk dan stasiun televisi yang menyiarkannya) secara terus menerus disampaikan kepada publik, kinerja KPI dalam pengawasan dapat diketahui publik. Proses yang ditempuh dengan cara ini adalah maturisasi (pendewasaan) publik bukan mobilisasi (pengerahan) massa.

Untuk itulah KPI harus menjadi acuan bagi elemen-elemen masyarakat tentang data media siaran yang melakukan pelanggaran dan materi siaran yang dianggap tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Hasil kerja pengawasan KPI secara periodik dipublikasikan kepada masyarakat luas. Bila mungkin, setiap stasiun televisi yang mendapatkan pelanggaran terbanyak perlu untuk diberi sanksi.

Kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat bisa tetap dilakukan asalkan KPI tidak menjadi bagian dari MoU tersebut. Biarlah berbagai elemen masyarakat yang membangun kesepakatan bila mereka akan mengawasi program siaran. KPI tetap pada posisinya sebagai lembaga negara yang menjadi pemantau siaran. Aliansi elemen-elemen masyarakat itu memosisikan diri sebagai kekuatan komplementer agar KPI fungsional.

Peran Perguruan Tinggi Memberdayakan Masyarakat

Saat ini, berbagai gerakan untuk mengawasi siaran televisi mulai gencar dilakukan. Hal ini jelas positif dan dapat menjadi indikasi

bahwa masyarakat mulai cerdas dalam mengapresiasi tayangan televisi. Kekhawatiran khalayak sebagai konsumen televisi akan mendorong stasiun televisi untuk berhati-hati dalam menyajikan siaran.

Perguruan tinggi perlu untuk mengambil peran mendewasakan publik. Publik tidaklah subjek pasif. Boleh jadi, mereka larut menikmati sajian televisi hanya saja khalayak juga memiliki kecerdasan untuk menganggap realitas televisi bukanlah realitas sesungguhnya. Karenanya, tayangan televisi sebatas sekadar hiburan untuk melupakan kepenatan hidup tanpa memosisikannya sebagai panutan nilai.

Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi dapat menjadi ruang untuk mendewasakan publik. Penonton televisi kita memang lebih condong masyarakat menengah ke bawah yang berada di daerah pinggiran kota dan pedesaan. Penonton televisi kita sangatlah heterogen. Baik dari latar belakang pendidikan maupun tingkat pendapatan ekonomi. Tentunya perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk “berdaya” melawan tayangan yang memang tidak mendidik.

Selain itu, perguruan tinggi juga dapat bekerjasama dengan berbagai kelompok yang memiliki perhatian terhadap tayangan media. Gerakan kampanye berkesinambungan yang disuarakan berbagai kelompok atau elemen masyarakat terhadap tayangan televisi merupakan upaya yang bagus untuk menumbuhkan sikap kritis masyarakat yang merupakan salah satu senjata untuk melawan kekuatan (buruk) televisi.

Referensi:

- A. Pilliang, Yasraf. 2005. *Transpolitika Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Burton, Braeme. 2007. *Membincangkan Televisi Sebuah Pengantar Kepada Studi Televisi*. Yogyakarta: Jalasutra
- Tim Peneliti PKMBP. 2013. *Model-Model Literasi Media dan Pemantauan Media di Indonesia*. Yogyakarta: PKMBP dan TIFA

KOMUNIKASI DAN REALITAS MEDIA DI INDONESIA

Buku berjudul KOMUNIKASI DAN REALITAS MEDIA DI INDONESIA ini merupakan rangkaian tiga tulisan dari staf pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi STPM 'APMD' Yogyakarta.

Televisi, Kecemasan Publik, dan KPI oleh Fadjarini Sulistyowati; Konglomerasi Media di Indonesia: Berkah atau Musibah Bagi Demokrasi? oleh Tri Agus Susanto; dan Instalasi Komunikasi dalam Humanisme: Upaya Melacak Epistemologi oleh Sahrul Aksa.

Dua tulisan pertama memotret realitas media di Indonesia saat ini. Sementara tulisan ketiga merupakan pandangan mendasar tentang komunikasi. Fadjarini Sulistyowati mencatat beberapa tayangan sinetron televisi memang berlebihan yang terkesan tidak mendidik.

Salah satu sinetron misalnya menampilkan pemain dari daerah Papua dengan kesan berlebihan seolah mereka adalah masyarakat dari budayaprimatif dengan menggunakan atribut kedaerahan yang menonjolkan kekonyolannya. Sangatlah ironis, bila tayangan ini menjadikan budaya daerah sebagai bahan lawakan. Kita tentunya berharap tayangan hiburan dapat mewakili berbagai budaya di Indonesia namun bukan meminggirkan budaya yang lain.



Lintang Pustaka Utama

Karangjati RT 19 RW 042

Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

E-mail: pustaka_utama@yahoo.com

ISBN 978-602-1546-04-8



9 786021 154604